



LAPORAN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI NTB TAHUN 2024 TRIWULAN I

**BAPPEDA PROVINSI NTB
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan ridha-Nya sehingga Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTB pada Triwulan I Tahun 2023 ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Laporan evaluasi RKPD Triwulan I merupakan Laporan evaluasi pelaksanaan program prioritas berdasarkan sasaran pembangunan sampai Triwulan I Tahun 2024. Laporan ini mengacu pada RKPD Tahun 2024 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 48 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024. Dalam RKPD Provinsi NTB Tahun 2024, terdapat 13 sasaran pembangunan daerah dengan 35 Indikator dan 10 Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi NTB. Berdasarkan hasil evaluasi pada triwulan I, terdapat 148 program prioritas pembangunan daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.739.587.403.552,00, sedangkan alokasi dalam APBD Tahun 2024 menjadi Rp. 6.205.414.024.675 atau ada peningkatan sebesar Rp. 465.830.873.247 dengan realisasi mencapai sebesar Rp1.367.697.226.758,57 atau sebesar 22,04% dengan realisasi program masih nihil karena belum dapat diukur capaian outcomenya sedangkan realisasi kegiatan sudah mencapai 22,89%. Adapun realisasi Indikator Kinerja Utama pembangunan daerah, terdapat 2 indikator yang sudah dapat diukur tetapi capaiannya belum memenuhi target. Adapun indikator yang sudah dapat diukur yaitu Kontribusi sektor gabungan lapangan usaha ekonomi yang berbasis pada sektor pertanian terhadap PDRB, dan Persentase peningkatan pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB

Demikian laporan ini disusun dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja serta sebagai bahan perencanaan selanjutnya dalam pembangunan di NTB. Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga serta dukungan dan kontribusinya terhadap penyelesaian laporan ini. Penyusunan laporan ini tentu masih memiliki kekurangan, dan Bersama ini diharapkan saran dan kritik yang membangun dalam rangka penyempurnaan di masa mendatang sehingga dapat lebih baik dan informatif.

Mataram, 2024
KEPALA BAPPEDA PROVINSI NTB

Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19651231 199403 1 153

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN.....	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Landasan Hukum	7
1.3 Tujuan	8
1.4 Sasaran	8
1.5 Sistematika Penulisan Laporan	8
BAB II : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024	10
2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RKPD Tahun 2024	10
2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024.....	15
BAB III : CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2024 TRIWULAN I.....	45
3.1 Capaian Indikator Makro Provinsi NTB Tahun 2023 dan Triwulan I 2024 45	
3.2 Evaluasi terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah.....	55
3.3 Evaluasi terhadap Capaian Indikator Kinerja Daerah.....	57
3.4 Evaluasi terhadap Capaian Pelaksanaan Program Prioritas	78
BAB IV : PENUTUP.....	33
4.1 Kesimpulan	33
4.2 Rekomendasi	34

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Keselarasan Tema, Prioritas Nasional (PN) dan Prioritas Daerah (PD) Tahun 2024	16
Tabel 2. 2 Prioritas Pembangunan Provinsi NTB	33
Tabel 3. 1 Capaian Indikator Makro Provinsi NTB	45
Tabel 3. 2 Perkembangan Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi NTB, Tahun 2020-2023	53
Tabel 3. 3 Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah berdasarkan RPD 2024-2026 pada Tahun 2023 dan Triwulan I tahun 2024	56
Tabel 3. 4 tingkat capaian aspek kesejahteraan masyarakat sampai triwulan I Tahun 2024	57
Tabel 3. 5 tingkat capaian aspek daya saing daerah sampai triwulan I Tahun 2024 ..	58
Tabel 3. 6 tingkat urusan wajib pelayanan dasar sampai triwulan I Tahun 2024	59
Tabel 3. 7 Capaian Program Prioritas berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah sampai Triwulan I Tahun 2024	33

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3. 1 Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (y on y) (persen).....	46
Grafik 3. 2 Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha	47
Grafik 3. 3 Sumber Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (y-on-y) (persen)	48
Grafik 3. 4 Penurunan Kemiskinan Ekstrem Sebesar 0,65% (32.939 jiwa)	49
Grafik 3. 5 Perkembangan Kemiskinan NTB dan Nasional periode 2019 - 2023 (Maret)	50
Grafik 3. 6 Tren dan Perbandingan Gini Ratio NTB dan Nasional	51
Grafik 3. 7 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi NTB Tahun 2020-2023.....	52
Grafik 3. 8 Proprsri Pekerja Penuh Dan Pekerja Tidak Penuh.....	55
Grafik 3. 9 Capaian aspek kesejahteraan masyarakat	75
Grafik 3. 10 Proporsi Tingkat Capaian Aspek Daya Saing Daerah	76
Grafik 3. 11 Proporsi tingkat capaian Aspek Pelayanan Umum	76

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia, sebagai dokumen perencanaan tahunan.

Dengan telah berakhirnya periodisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2023, tahun 2024 merupakan tahun pertama masa transisi kepemimpinan kepala daerah yang dijabat oleh Penjabat Kepala Daerah sampai terpilihnya kepala daerah definitif, sehingga perencanaan pembangunan di daerah disusun sesuai dengan transisi kepemimpinan di daerah. Dalam masa transisi tersebut, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 yang memerintahkan bahwa Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2023, agar menyusun dokumen perencanaan jangka menengah yang baru yang disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

Pemerintah Provinsi NTB telah menetapkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 merupakan tahun pertama penjabaran RPD Provinsi NTB Tahun 2024-2026, dan telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 dan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024.

RKPD Provinsi NTB Tahun 2024 fokus pada Pembangunan manusia dan lingkungan, meningkatkan produktivitas, daya saing daerah dan penghapusan kemiskinan ekstrim, tahap kedua Penguatan industrialisasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan dukungan reformasi birokrasi dan pembangunan berkelanjutan dan tahap ketiga Peningkatan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan dengan manusia dan lingkungan yang berkualitas, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di kawasan Bali-Nusa Tenggara. Pada pelaksanaan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 mengusung Tema:

“Peningkatan Produktivitas Daerah Untuk Mempercepat Transformasi Ekonomi Melalui Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Berkualitas”.

Dalam mewujudkan dan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan daerah yang telah dituangkan dalam dokumen RKPD maka dilaksanakan pengendalian dan evaluasi. Kegiatan evaluasi pelaksanaan RKPD dilakukan setiap triwulan guna memastikan bahwa target rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD provinsi dapat dicapai. Hal ini dilaksanakan berdasarkan amanat yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada pasal 261 disebutkan bahwa evaluasi terhadap hasil RKPD lingkup provinsi mencakup sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas Daerah. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD Provinsi untuk mengetahui realisasi antara rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD provinsi, dengan capaian indikator kinerja program, lokasi, dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD provinsi; serta realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD provinsi dengan laporan realisasi APBD provinsi. Apabila berdasarkan hasil evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan baik dari aspek perencanaan dan pelaksanaannya maka BAPPEDA bersama dengan perangkat daerah terkait melakukan tindakan perbaikan penyempurnaan baik pada pelaksanaan program/ kegiatan pada triwulan berikutnya maupun sebagai bahan masukan dalam penyusunan perubahan RKPD provinsi NTB Tahun 2024 dan RKPD Provinsi NTB tahun berikutnya.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Prov. NTB TA. 2024
5. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026
6. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026
7. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Dan Perangkat Daerah Tahun 2024-2026
8. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024
9. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024

1.3 Tujuan

Tujuan dari kegiatan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024 ini adalah untuk mengetahui:

1. Daya serap dan capaian target kinerja sasaran pembangunan dan program/kegiatan/sub kegiatan prioritas mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Tahun 2024;
2. Tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu program/kegiatan;
3. Kinerja sebelumnya yang dapat dicapai dalam pelaksanaan pembangunan baik tingkat program maupun kegiatan.

1.4 Sasaran

Sasaran dari kegiatan evaluasi RKPD Tahun 2024 ini adalah untuk mengukur capaian Sasaran Pembangunan dan program/kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 sesuai dengan dokumen RKPD Tahun 2024.

1.5 Sistematika Penulisan Laporan

Dalam penulisan Laporan Evaluasi RKPD Tahun 2024 dilakukan dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, tujuan, sasaran, dan sistematika penulisan laporan;
- Bab II : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024. Bab ini berisi tentang prioritas sasaran dan target pembangunan sebagaimana yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2024;
- Bab III : Capaian Target Kinerja Dan Penyerapan Anggaran tahun 2024 Triwulan I, berisi Capaian RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 sampai tahun 2024;
- Bab IV : Penutup

BAB II : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024

2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RKPD Tahun 2024

Tahun 2024 merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan RPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan yang mengacu pada berbagai dokumen perencanaan serta berbagai isu aktual yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan, maka pada tahun 2024 fokus perencanaan pembangunan daerah adalah pembangunan manusia (*People*), pembangunan lingkungan (*Planet*), Pembangunan kesejahteraan (*Prosperity*), tatakelola (*governance*), pembangunan berkelanjutan (SDGs), dan daya saing daerah (*Competitiveness*). Selanjutnya diturunkan menjadi rangkaian rumusan tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah Provinsi NTB tahun 2024.

Tujuh Tujuan Pembangunan daerah provinsi NTB tahun 2024-2026 sebagai berikut:

1. Terwujudnya transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas daerah menuju NTB sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi regional Bali dan Nusa Tenggara yang inklusif dan berkelanjutan
2. Terwujudnya peningkatan kualitas manusia yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT)
3. Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan yang lestari dan asri
4. Terwujudnya kualitas kesejahteraan masyarakat yang mandiri
5. Terwujudnya peningkatan tata kelola pemerintahan daerah
6. Terwujudnya peningkatan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)
7. Terwujudnya peningkatan daya saing daerah

Adapun 13 sasaran strategis pembangunan daerah provinsi NTB tahun 2024-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan lapangan kerja dan produktivitas daerah
2. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan serta derajat kesehatan masyarakat
3. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Nusa Tenggara Barat yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT)
4. Meningkatnya ketahanan iklim dan ketangguhan menghadapi resiko bencana
5. Meningkatnya kualitas ekosistem darat, laut dan udara

6. Meningkatnya pemerataan pendapatan serta kesejahteraan lahiriah (fisik) dan rohaniyah (non fisik)
7. Meningkatnya perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial dan inklusi keuangan
8. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pola pikir, kelembagaan, regulasi dan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan public
9. Meningkatnya kemandirian fiskal daerah
10. Meningkatnya integrasi program pembangunan daerah dan peran pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)
11. Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan strategis, kawasan transmigrasi dan perdesaan, mendorong investasi dan percepatan industrialisasi
12. Meningkatnya konektivitas yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan regional
13. Meningkatnya kapabilitas inovasi mendukung peningkatan kinerja IV-5endidik dan pengembangan ekspor.

Adapun target kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada tahun 2024 sebagai berikut:

No	Tujuan dan Sasaran		Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Penanggung Jawab	
					2024	Utama	Pendukung
I	TERWUJUDNYA TRANSFORMASI EKONOMI MELALUI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAERAH MENUJU NTB SEBAGAI LOKOMOTIF PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL BALI DAN NUSA TENGGARA YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN		Kontribusi sektor gabungan lapangan usaha ekonomi yang berbasis pada sektor pertanian terhadap PDRB	%	50-53	Dikoordinasikan oleh Sekda/Bappeda	Semua OPD Terkait
			Persentase peningkatan pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB	%	6,5	Dikoordinasikan oleh Sekda/Bappeda	Semua OPD Terkait
	1	Meningkatnya lapangan kerja dan	Laju pertumbuhan ekonomi dengan tambang	%	5.8-7.1	Dikoordinasikan oleh Sekda/Bappeda	Semua OPD Terkait

No	Tujuan dan Sasaran		Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Penanggung Jawab	
					2024	Utama	Pendukung
		produktivitas daerah	Laju pertumbuhan ekonomi tanpa tambang	%	5.2-6.5	Dikoordinasikan oleh Sekda/Bappeda	Semua OPD Terkait
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,98	Dikoordinasikan oleh Sekda/Bappeda	Semua OPD Terkait
II	TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS MANUSIA YANG KOMPETITIF, UNGGUL, ANDAL DAN TAQWA (KUAT)		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	point	70,88	Dikoordinasikan oleh Sekda/Bappeda	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan
2		Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan serta derajat kesehatan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	9,39	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Semua OPD Terkait
			Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Semua OPD Terkait
			Umur Harapan Hidup (UHH)	tahun	67,67	Dinas Kesehatan	Semua OPD Terkait
			Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KH	257-189	Dinas Kesehatan	Semua OPD Terkait
			Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1000 KH	24.64-16.85	Dinas Kesehatan	Semua OPD Terkait
3		Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Nusa Tenggara Barat yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT)	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	point	68,5	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Semua OPD Terkait
			Persentase kota kreatif	%	30	Dinas Pariwisata	Semua OPD Terkait
			Indeks Pembangunan Kebudayaan	point	54-60	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Semua OPD Terkait
			Persentase penanganan konflik SARA	%	100	Bakesbangpoldagri	Biro Hukum, Biro Kesra, Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas PMD dan Dukcapil
III	TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN YANG LESTARI DAN ASRI		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	point	75,34	Dikoordinasikan oleh Sekda/Bappeda	Dinas LHK
4		Meningkatnya ketahanan iklim dan ketangguhan menghadapi resiko bencana	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	19,7	Dinas LHK	Semua OPD Terkait
			Indeks Risiko Bencana (IRB)	point	113,08	BPBD	Semua OPD Terkait

No	Tujuan dan Sasaran		Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Penanggung Jawab	
					2024	Utama	Pendukung
			Bauran energi baru terbarukan	%	20,99	Dinas ESDM	Dinas LHK, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PUPR
	5	Meningkatnya kualitas ekosistem darat, laut dan udara	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	point	65,56	Dinas LHK	Semua OPD Terkait
			Indeks Kualitas Air	point	45,71	Dinas LHK	Semua OPD Terkait
			Indeks Kualitas Udara	point	75-89	Dinas LHK	Dinas Perhubungan
IV	TERWUJUDNYA KUALITAS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG MANDIRI		Angka kemiskinan	%	<10	Dikoordinasikan oleh Sekda/Bappeda	Dinas Sosial
			Prevalensi Stunting	%	14	Dikoordinasikan oleh Sekda/Bappeda	Dinas Kesehatan
			Gini rasio	angka	0,366	Dikoordinasikan oleh Sekda/Bappeda	Dinas Perdagangan, Dinas PUPR, DPMPTSP
	6	Meningkatnya pemerataan pendapatan serta kesejahteraan lahiriah (fisik) dan rohaniyah (non fisik)	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	point	68,73	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Semua OPD Terkait
			Indeks Ketahanan Pangan	point	77,67	Dinas Ketahanan Pangan	Semua OPD Terkait
			Indeks Kesejahteraan Sosial	kategori	Baik	Dinas Sosial	Semua OPD Terkait
			Indeks Demokrasi	point	77,47	Bakesbangpoldagri	Semua OPD Terkait
	7	Meningkatnya perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial dan inklusi keuangan	Tingkat inflasi	%	2-4	Biro Perekonomian	Semua OPD Terkait
			Persentase kepesertaan jaminan sosial kesehatan/ Universal Health Coverage (UHC)	%	95	Dinas Kesehatan	Semua OPD Terkait
			Persentase kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	43	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Semua OPD Terkait
			Peningkatan Pendapatan per kapita	%	8	Dikoordinasikan oleh Sekda/Bappeda	Semua OPD Terkait

No	Tujuan dan Sasaran		Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Penanggung Jawab	
					2024	Utama	Pendukung
			Tingkat Literasi Keuangan	%	65-67	Biro Perekonomian	Semua OPD Terkait
V	TERWUJUDNYA PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH		Indeks Reformasi Birokrasi	point	BB	Dikoordinasikan oleh Sekda/Bappeda	Inspektorat
	8	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pola pikir, kelembagaan, regulasi dan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik	Nilai SAKIP	kategori	A	Dikoordinasikan oleh Sekda/Biro Organisasi	Inspektorat dan Bappeda
	9	Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	point	Sedang	Bappeda, BPKAD	Semua OPD Terkait, terutama penghasil PAD
VI	TERWUJUDNYA PENINGKATAN CAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGs)		Persentase Capaian Indikator SDGs	%	63	Dikoordinasikan oleh Sekda/Bappeda	Semua OPD Terkait
	10	Meningkatnya integrasi program pembangunan daerah dan peran pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)	Persentase capaian Pilar Pembangunan Sosial	%	65	Dikoordinasikan oleh Sekda/Bappeda	Semua OPD Terkait
			Persentase capaian Pilar Pembangunan Ekonomi	%	60	Dikoordinasikan oleh Sekda/Bappeda	Semua OPD Terkait
			Persentase capaian Pilar Pembangunan Lingkungan	%	67	Dikoordinasikan oleh Sekda/Bappeda	Semua OPD Terkait
			Persentase capaian Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola	%	60	Dikoordinasikan oleh Sekda/Bappeda	Semua OPD Terkait

No	Tujuan dan Sasaran		Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Penanggung Jawab	
					2024	Utama	Pendukung
VII	TERWUJUDNYA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH		Indeks Daya Saing Daerah	point	3,35	Dikoordinasikan oleh Sekda/Bappeda	Semua OPD Terkait
	11	Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan strategis, kawasan transmigrasi dan perdesaan, mendorong investasi dan percepatan industrialisasi	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	point	77	Dinas PUPR	Semua OPD Terkait
	12	Meningkatnya konektivitas yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan regional	Rasio konektivitas	%	94	Dinas Perhubungan	Semua OPD Terkait
	13	Meningkatnya kapabilitas inovasi mendukung peningkatan kinerja industri dan pengembangan ekspor	Indeks Inovasi Daerah	point	78	BRIDA	Semua OPD Terkait

2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan RPD 2024-2026 disusun berdasarkan isu strategis, tujuan dan sasaran pembangunan dan arah kebijakan, sehingga keterkaitan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2024 dengan arah kebijakan RPJMD untuk Tahun 2024 sangat erat dengan tema “Peningkatan Produktivitas Daerah Untuk Mempercepat Transformasi Ekonomi Melalui Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Berkualitas”. Terdapat 7 (tujuh) prioritas pembangunan daerah pada RPD Tahun 2024-2026. Berdasarkan isu strategis tahun 2024, perumusan prioritas pembangunan disajikan dengan tetap menjaga keterkaitan antara prioritas pembangunan daerah dengan arah kebijakan, isu strategis, dan pokok-pokok pikiran tahunan DPRD.

Pembangunan Konektivitas dan Akseibilitas Wilayah dengan fokus Pengelolaan Kesehatan untuk Daya Saing SDM dengan fokus

Pengelolaan Pendidikan untuk Daya Saing SDM dengan fokus Pengelolaan Lingkungan Bersih dan Berkelanjutan dengan fokus

Pertanian/Agribisnis dan Investasi Progresif dengan fokus Pariwisata Andalan dengan fokus Industrialisasi Unggul dengan fokus Meraih Masyarakat Madani (Bahagia) dengan Perumusan prioritas pembangunan disajikan dengan tetap menjaga keterkaitan antara prioritas pembangunan daerah dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional. Keterkaitan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Arah Kebijakan

Tabel Keselarasan Tema, Prioritas Nasional (PN) dan Prioritas Daerah (PD) Tahun 2024

Tabel 2. 1 Keselarasan Tema, Prioritas Nasional (PN) dan Prioritas Daerah (PD) Tahun 2024

Tema Nasional	Tema Daerah
" Percepatan Mewujudkan Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan "	" Peningkatan Produktivitas Daerah Untuk Mempercepat Transformasi Ekonomi Melalui Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Berkualitas "
Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah (PD)
PN 1	PD 1
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan (PD 1)	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang (PN 1), (PN 5)
PN 2	PD 2
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PD 3), (PD 4)	Pembangunan Manusia (PN 3), (PN 4)
PN 3	PD 3
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PD 2)	Pembangunan Lingkungan (PN 2), (PN 5), (PN 6)
PN 4	PD 4
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PD 2), (PD 5)	Pembangunan Kesejahteraan (PN 2)
PN 5	PD 5
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PD 1), (PD 3)	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah (PN 4), (PN 7)
PN 6	PD 6

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim (PD 3), (PD 6)	Peningkatan Komitmen Dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) (PN 6)
PN 7	PD 7
Memperkuat Stabilitas Politik Hukum Pertahanan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PD 5), (PD 7)	Peningkatan Daya saing Daerah (PN 7)

Sumber : Data olahan Bappeda NTB, 2023

Prioritas Pembangunan.

Tabel 2. 2 Prioritas Pembangunan Provinsi NTB

Prioritas Pembangunan Daerah/ Sasaran Pembangunan		Program Prioritas Pelaksanaan Urusan
PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI TANPA TAMBANG (PD 1)		
1	Meningkatnya lapangan kerja dan produktivitas daerah	Program Pengembangan Perumahan
		Program Hubungan Industrial
		Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
		Program Kesejahteraan Rakyat
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
		Program Pelayanan Penanaman Modal
		Program Pemasaran Pariwisata
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
		Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Program Penanggulangan Bencana
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
		Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

Prioritas Pembangunan Daerah/ Sasaran Pembangunan		Program Prioritas Pelaksanaan Urusan
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Program Penempatan Tenaga Kerja
		Program Pengawasan Keamanan Pangan
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		Program Pengelolaan Hutan
		Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
		Program Pengelolaan Mineral dan Batubara
		Program Pengelolaan Pendidikan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
		Program Pengelolaan Persampahan
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
		Program Pengembangan Ekspor
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
		Program Pengembangan UMKM
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Prioritas Pembangunan Daerah/ Sasaran Pembangunan		Program Prioritas Pelaksanaan Urusan
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
		Program Penyelenggaraan Jalan
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
		Program Perekonomian dan Pembangunan
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
		Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
		Program Promosi Penanaman Modal
		Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
PEMBANGUNAN MANUSIA (PD-2)		
2	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan serta derajat kesehatan masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		Program Pengelolaan Pendidikan
		Program Pengembangan Kurikulum

Prioritas Pembangunan Daerah/ Sasaran Pembangunan		Program Prioritas Pelaksanaan Urusan
		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
3	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Nusa Tenggara Barat yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT)	Program Hubungan Industrial
		Program Kesejahteraan Rakyat
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
		Program Pembinaan Perpustakaan
		Program Pembinaan Sejarah
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Program Pengawasan Ketenagakerjaan
		Program Pengelolaan Pendidikan
		Program Pengembangan Bahasa dan Sastra
		Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Prioritas Pembangunan Daerah/ Sasaran Pembangunan		Program Prioritas Pelaksanaan Urusan
		Program Pengembangan Kebudayaan
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional
		Program Pengembangan Kurikulum
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
PEMBANGUNAN LINGKUNGAN (PD-3)		
4	Meningkatnya ketahanan iklim dan ketangguhan menghadapi resiko bencana	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		Program Pengelolaan Hutan
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
		Program Pengelolaan Pelayaran
		Program Pengelolaan Persampahan

Prioritas Pembangunan Daerah/ Sasaran Pembangunan		Program Prioritas Pelaksanaan Urusan
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
		Program Pengembangan Perumahan
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
		Program Penyelenggaraan Jalan
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup
5	Meningkatnya kualitas ekosistem darat, laut dan udara	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
		Program Penataan Organisasi
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
		Program Pengelolaan Energi Terbarukan

Prioritas Pembangunan Daerah/ Sasaran Pembangunan		Program Prioritas Pelaksanaan Urusan
		Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
		Program Perekonomian dan Pembangunan
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN (PD-4)		
6	Meningkatnya pemerataan pendapatan serta kesejahteraan lahiriah (fisik) dan rohaniyah (non fisik)	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
		Program Pemberdayaan Sosial
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Program Penanganan Kerawanan Pangan
		Program Penanggulangan Bencana
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		Program Pengelolaan Energi Terbarukan
		Program Pengelolaan Hutan

Prioritas Pembangunan Daerah/ Sasaran Pembangunan		Program Prioritas Pelaksanaan Urusan
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
		Program Pengembangan Perumahan
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
		Program Penyuluhan Pertanian
		Program Perekonomian dan Pembangunan
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
7	Meningkatnya perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial dan inklusi keuangan	Program Hubungan Industrial
		Program Kawasan Permukiman
		Program Kesejahteraan Rakyat
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Prioritas Pembangunan Daerah/ Sasaran Pembangunan		Program Prioritas Pelaksanaan Urusan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		Program Pengelolaan Hutan
		Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		Program Pengembangan Perumahan
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
		Program Penyuluhan Pertanian
		Program Perekonomian dan Pembangunan
PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH (PD-5)		
8	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pola pikir, kelembagaan, regulasi dan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik	Program Kepegawaian Daerah
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
		Program Penataan Organisasi
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Prioritas Pembangunan Daerah/ Sasaran Pembangunan		Program Prioritas Pelaksanaan Urusan
		Program Penyelenggaraan Pengawasan
9	Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
		Program Penyelenggaraan Pengawasan
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
PENINGKATAN KOMITMEN DAN CAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGs) (PD-6)		
10	Meningkatnya integrasi program pembangunan daerah dan peran pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
		Program Kesejahteraan Rakyat
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Perekonomian dan Pembangunan
		Program Pengelolaan Persampahan
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
PENINGKATAN DAYASAING DAERAH (PD-7)		
11	Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan strategis, kawasan transmigrasi dan perdesaan,	Program Adminsitasi Pemerintahan Desa
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Prioritas Pembangunan Daerah/ Sasaran Pembangunan		Program Prioritas Pelaksanaan Urusan
	mendorong investasi dan percepatan industrialisasi	Program Pelayanan Penanaman Modal
		Program Promosi Penanaman Modal
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri
		Program Pengembangan Permukiman
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
		Program Penyelenggaraan Jalan
12	Meningkatnya konektivitas yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan regional	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
		Program Pelayanan Penanaman Modal
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Program Promosi Penanaman Modal
13	Meningkatnya kapabilitas inovasi mendukung peningkatan kinerja industri dan pengembangan ekspor	Program Penanggulangan Bencana
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		Program Pengelolaan Energi Terbarukan
		Program Pengelolaan Pelayaran
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Prioritas Pembangunan Daerah/ Sasaran Pembangunan		Program Prioritas Pelaksanaan Urusan
		Program Pengembangan Perumahan
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		Program Penyelenggaraan Jalan
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Sumber: RKPD Provinsi NTB 2024

BAB III : CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2024 TRIWULAN I

3.1 Capaian Indikator Makro Provinsi NTB Tahun 2023 dan Triwulan I 2024

Pencapaian indikator makro pembangunan daerah provinsi NTB pada tahun 2023 sampai triwulan 1 tahun 2024 dapat disajikan dalam table berikut ini:

Tabel 3. 1 Capaian Indikator Makro Provinsi NTB

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi TW I	Tingkat Capaian (%)
1	Pertumbuhan Ekonomi							
	• Dengan tambang Bijih Logam	%		3,66		5,8-7,1	4,75	81,90
	• Tanpa tambang Bijih Logam	%	4,5-5,5	4,72	104,89	5,2-6,5	3,01	57,88
2	Inflasi	%	3,0 - 4,0	3,02	100,67	2-4	3,63	100,00
3	Tingkat Kemiskinan	%	11,92	13,85	83,81	<10	NA	-
4	Gini Ratio	Point	0,297	0,375	73,74	0,366	NA	-
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Point	70,09	72,37	103,25	73,11-73,96	NA	-
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,7-3,1	2,8	100	2,98	3,30	89,26

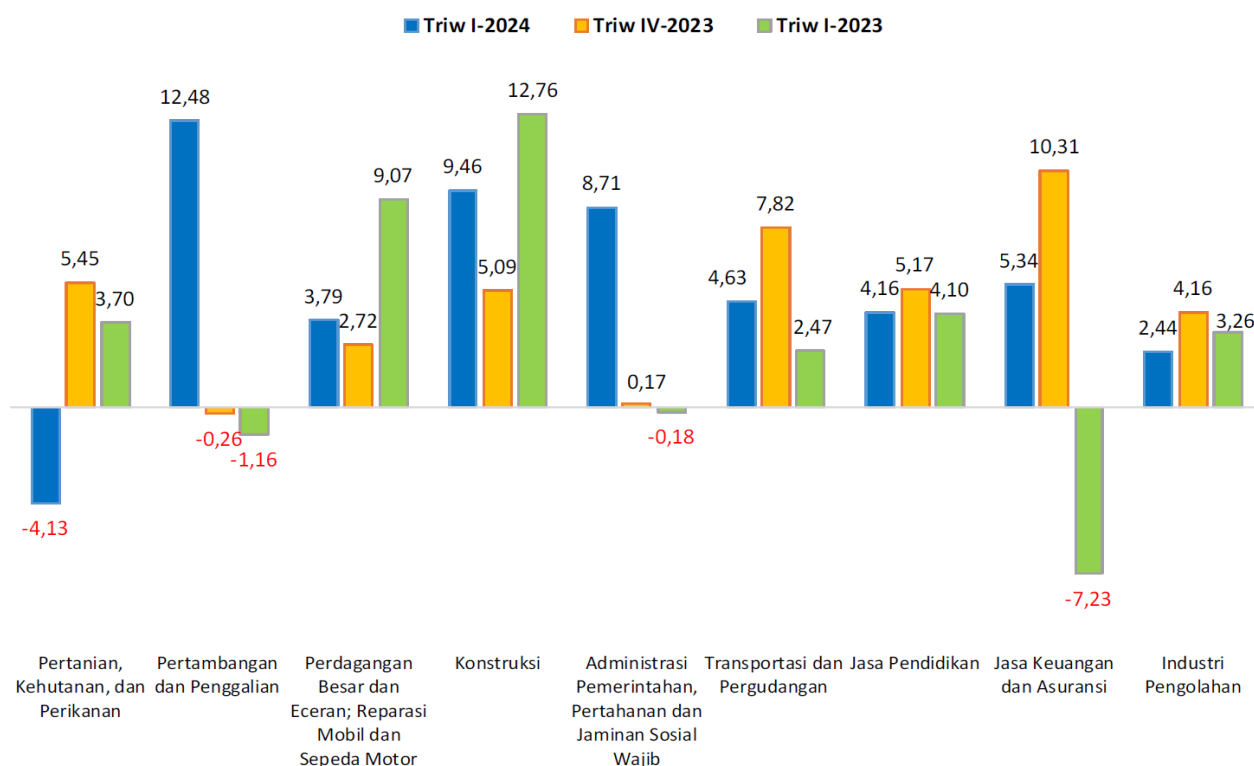
Sumber : BPS Provinsi NTB, 2024

Dari 6 indikator makro provinsi NTB, pada tahun 2023 terdapat 4 indikator tercapai atau memenuhi target yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sedangkan 2 indikator yang tidak memenuhi target yaitu tingkat kemiskinan, dan gini rasio (ketimpangan) sedangkan pada triwulan I 2024 hanya inflasi yang masih dalam rentang kendali antara 2-4%. Sedangkan 5 indikator lain belum memenuhi target yang ditetapkan antara lain pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan gini rasio (ketimpangan). Deskripsi pencapaian indikator makro sebagai berikut:

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB Triwulan I-2024 dibanding Triwulan I-2023 (*y-on-y*) mengalami pertumbuhan sebesar 4,75 persen. Meskipun pertumbuhannya cukup tinggi tetapi belum sesuai yang ditargetkan sebesar 5,8 – 7,1%. Pertumbuhan terjadi pada 16 (enam belas) lapangan usaha dan hanya 1 (satu) lapangan usaha yang mengalami kontraksi. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Pertambangan dan Penggalian sebesar 12,48 persen; Konstruksi sebesar 9,46 persen; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 8,71 persen. Selanjutnya, lapangan usaha Informasi dan Komunikasi tumbuh sebesar 8,16 persen; Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 6,50 persen; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 6,37 persen. Sementara itu, lapangan usaha yang terkontraksi yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 4,13 persen.

Grafik 3. 1 Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (*y on y*) (persen)



Struktur PDRB Nusa Tenggara Barat juga tidak mengalami perubahan, masih didominasi Lapangan Usaha yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mencapai 21,13 persen; Pertambangan dan Penggalian sebesar 21,10 persen; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,01 persen; dan

Konstruksi sebesar 9,43 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Nusa Tenggara Barat mencapai 65,67 persen.

Grafik 3. 2 Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha



Sementara itu dari sisi pengeluaran, ekonomi Provinsi NTB Triwulan I-2024 dibanding triwulan IV-2023 mengalami kontraksi sebesar 1,36 persen (*q-to-q*). Pertumbuhan hanya terjadi pada Komponen PKLNPRT yang tumbuh sebesar 3,36 persen. Komponen penyusun PDRB Menurut Pengeluaran lainnya mengalami kontraksi. Komponen dengan kontraksi terdalam adalah Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 22,52 persen. Komponen PKP dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) turut mengalami kontraksi masing-masing sebesar 7,66 dan 0,70 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa yang merupakan pengurang dalam PDRB Menurut Pengeluaran mengalami kontraksi sebesar 17,20 persen.

Grafik 3. 3
Sumber Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (y-on-y) (persen)



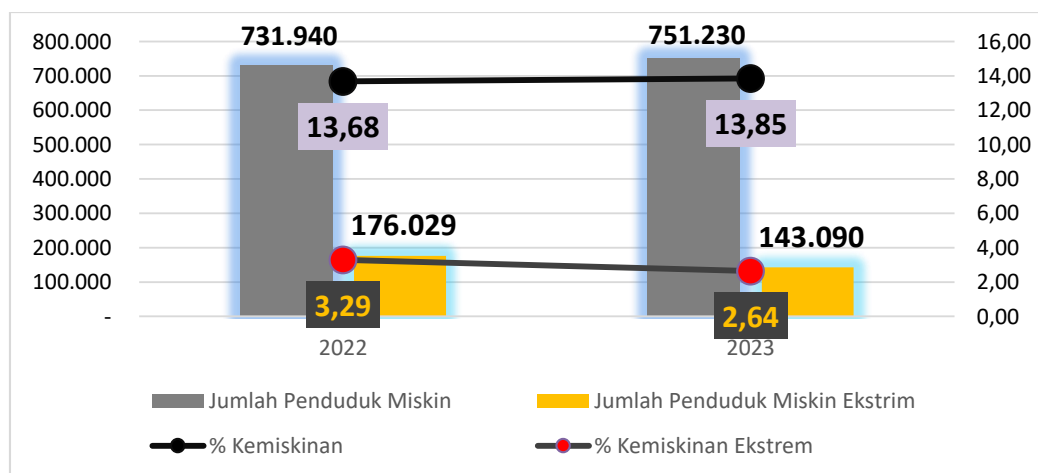
b. Tingkat Inflasi

Keberhasilan provinsi NTB dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang positif juga didukung oleh keberhasilan menjaga stabilitas harga sehingga inflasi yang terjadi pada triwulan I tahun 2024 sebesar 3,63 atau berada dalam interval target pemerintah daerah 2-4%. Berbagai terobosan juga telah dilakukan pemerintah provinsi NTB untuk menjaga kestabilan ekonom, diantaranya dengan melakukan pengendalian inflasi melalui sidak pasar, sidak gudang bulog, dan sidak distributor, operasi pasar stabilisasi harga, gerakan pangan murah, menerapkan Peraturan Gubernur NTB No. 38 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Distribusi Gabah, melakukan konsolidasi Tim Pencatat Komoditas Bahan Pokok Masyarakat, membentuk kampung tanggap inflasi (urban farming), menerapkan digital farming pada klaster tani yang terdapat di Provinsi NTB (Klaster padi Sapurata, Lombok Tengah), serta mendorong gerakan edukasi publik literasi pengendalian inflasi melalui beberapa media antara lain melalui baliho, iklan layanan masyarakat, videotron, media sosial BI dan radio.

c. Tingkat Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi yang positif belum sepenuhnya diikuti oleh penurunan angka kemiskinan yang signifikan. Meskipun belum ada rilis terbaru, namun dapat dilihat dari jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 751,23 ribu orang, bertambah 6,54 ribu orang terhadap September 2022 dan bertambah 19,29 ribu orang terhadap Maret 2022. Secara persentase, persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 13,85 persen, meningkat 0,03 persen poin terhadap September 2022 dan meningkat sebesar 0,17 persen terhadap Maret 2022. Namun dalam periode 2018-2023, pemerintah provinsi NTB telah berhasil mengurangi angka kemiskinan 0,78% dari kondisi awal pada tahun 2018 sebesar 14,63% menjadi 13,85% pada tahun 2023, serta mampu mengurangi kemiskinan ekstrem sebesar 0,65% sehingga masih tersisa 2,64%.

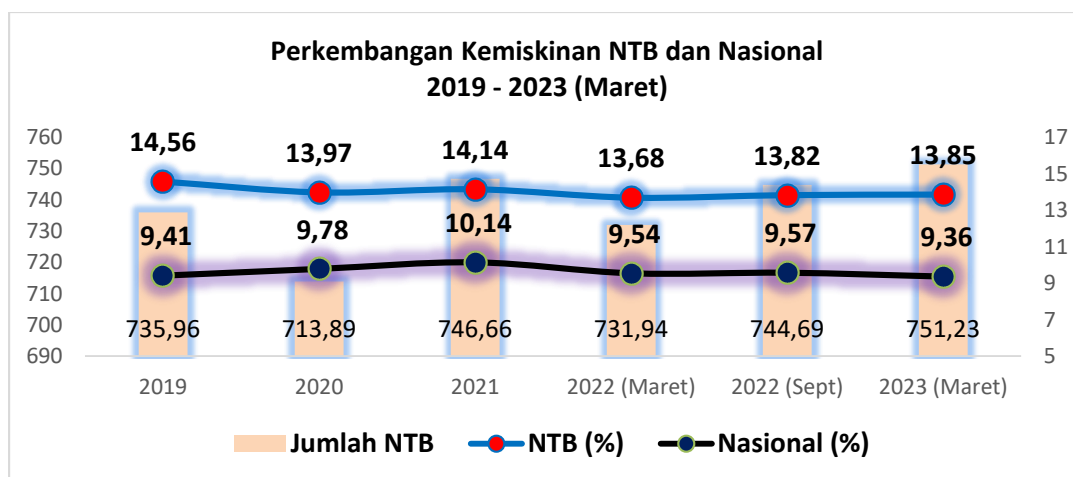
Grafik 3. 4
Penurunan Kemiskinan Ekstrem Sebesar 0,65% (32.939 jiwa)



Upaya yang telah dilakukan dalam percepatan penurunan kemiskinan di NTB antara lain penguatan dari sisi perencanaan dengan melakukan penyelarasan dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renja) dengan Penganggaran (fokus pada intervensi sesuai dengan data P3KE), pemetaan program dan penganggaran focus penurunan kemiskinan pada OPD, mendorong program dan kegiatan diarahkan untuk pelaksanaan 3 (tiga) strategi sesuai amanat Inpres 4/2022, serta memaksimalkan program insidentil tepat sasaran. Disamping itu dilakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan

pelaksanaan intervensi memiliki dampak terhadap penurunan kemiskinan ekstrim, pemetaan lokasi kantong kemiskinan dan Kawasan, melakukan verifikasi dan validasi melalui aplikasi Verifikasi Validasi Desa Sasaran Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (VVDSKPE), serta memantau pelaksanaan intervensi pada lokasi yang menjadi pelaksanaan program/kegiatan percepatan penurunan kemiskinan ekstrim. Penanggulangan kemiskinan perlu peran multipihak, untuk itu dilakukan koordinasi dan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, kecamatan dan desa dengan kolaborasi masyarakat sipil, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat maupun tokoh adat, melakukan koordinasi dengan K/L secara intensif serta koordinasi dengan Non Governmental Organization (NGO) dan Mitra Pembangunan lainnya.

Grafik 3. 5
Perkembangan Kemiskinan NTB dan Nasional periode 2019 - 2023 (Maret)



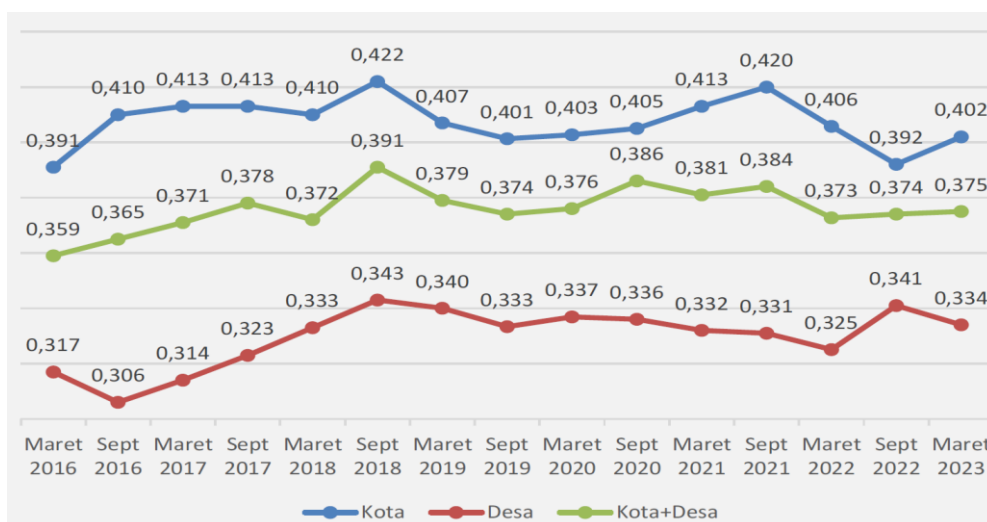
Penurunan angka kemiskinan NTB dalam tiga tahun terakhir memang cukup berat, dikarenakan adanya penambahan jumlah penduduk miskin selama Pandemi Covid-19 dan kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak. Namun demikian, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB untuk terus berikhtiar menurunkan angka kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dari alokasi belanja untuk penanggulangan kemiskinan mencapai Rp.2,76 triliun terdiri atas bersumber dana APBD Provinsi NTB mencapai Rp.238,2 miliar dan bersumber dari dana APBN mencapai 2,53 triliun, serta mendorong percepatan penerapan dan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

d. Gini Ratio

Pada sisi tingkat ketimpangan pengeluaran yang diukur oleh Gini Ratio, gini rasio penduduk NTB triwulan I tahun 2024 belum dirilis dan sampai pada tahun 2023 tercatat sebesar 0,375 atau mengalami peningkatan sebesar 0,003 poin jika dibandingkan dengan gini rasio 2018 sebesar 0,372. Jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan pada 2023 adalah sebesar 0,402. Sementara itu, Gini Ratio di daerah perdesaan 2023 adalah sebesar 0,334, hal ini berarti bahwa ketimpangan pengeluaran di daerah perkotaan selalu lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan di Provinsi NTB.

Secara umum, sejak Maret 2016 angka Gini Ratio mengalami fluktuasi sampai dengan Maret 2023. Fluktuasi Gini Ratio berkisar antara 0,36 sampai dengan 0,39. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut pemerataan pengeluaran di Provinsi Nusa Tenggara Barat tergolong cukup stabil.

Grafik 3. 6
Tren dan Perbandingan Gini Ratio NTB dan Nasional



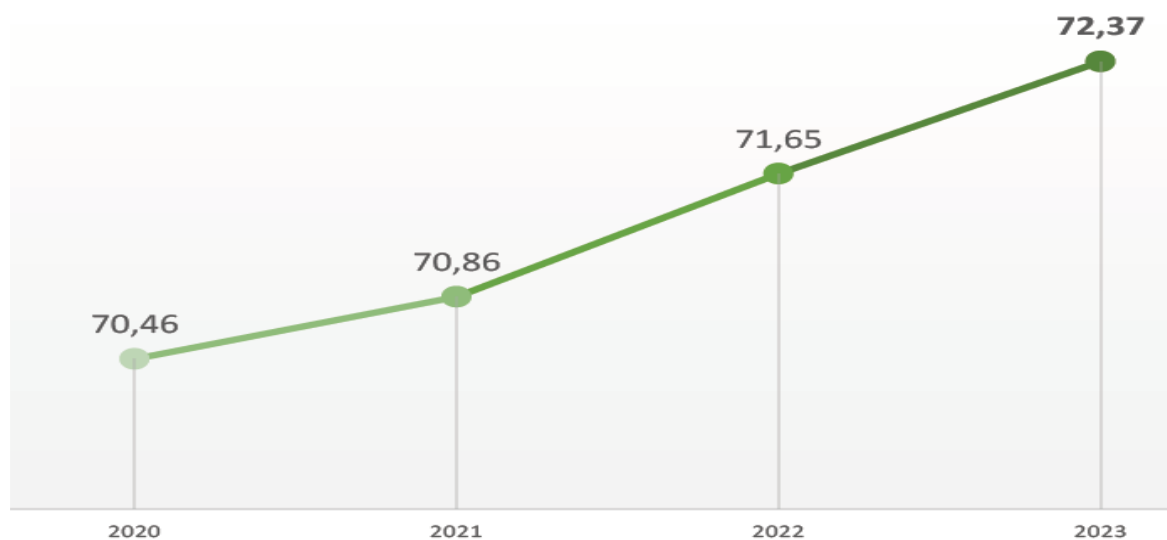
Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia yang membagi tingkat ketimpangan menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen. Pada tahun 2023, persentase

pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,34 persen yang berarti ada pada kategori ketimpangan rendah. Dengan demikian, menurut kriteria Bank Dunia daerah perkotaan maupun daerah perdesaan di NTB termasuk ketimpangan rendah.

e. Indeks Pembangunan Manusia

Pada dimensi pembangunan manusia, dalam 5 tahun pembangunan manusia terakhir di Provinsi NTB antara tahun 2018 sampai dengan 2023 terus mengalami kemajuan, yang ditandai dengan peningkatan IPM dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2020, status pembangunan manusia Indonesia di Provinsi NTB berada pada kategori tinggi. IPM Provinsi NTB tahun 2020 tercatat sebesar 70,46. IPM Provinsi NTB triwulan I Tahun 2024 belum dirilis, sampai pada tahun 2023 mencapai 72,37, meningkat hingga 1,00 persen dibandingkan tahun 2022. Rata-rata pertumbuhan IPM tahun 2020-2023 dikisaran 0,90 persen per tahun.

Grafik 3. 7
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi NTB
Tahun 2020-2023



Peningkatan capaian IPM Provinsi NTB Tahun 2023 disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan seluruh komponen pembentuk IPM, terutama rata-rata lama sekolah dan pengeluaran riil per kapita. Pada tahun 2023, komponen pembentuk IPM Provinsi NTB mengalami percepatan pertumbuhan, kecuali komponen harapan lama sekolah pada dimensi pengetahuan yang pertumbuhannya melambat dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 3. 2
Perkembangan Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi NTB, Tahun 2020-2023

Komponen	Satuan	2020	2021	2022	2023
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
Umur Harapan Hidup saat Lahir (tahun)	Tahun	71,17	71,33	71,66	72,02
Harapan Lama Sekolah (tahun)	Tahun	13,70	13,90	13,96	13,97
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Tahun	7,31	7,38	7,61	7,74
Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan (ribu rupiah)	Rp 000	10 351	10 377	10 681	11 095
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		70,46	70,86	71,65	72,37

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2023, UHH Provinsi NTB telah meningkat sebesar 0,85 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,40 persen per tahun. Pada tahun 2020, Umur Harapan Hidup saat lahir di Provinsi NTB adalah 71,17 tahun dan pada tahun 2023 mencapai 72,02 tahun.

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Capaian kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2010 hingga 2023, HLS Provinsi NTB rata-rata meningkat 1,40 persen per tahun dan RLS Provinsi NTB rata-rata meningkat 2,35 persen per tahun. Pada tahun 2023, HLS Provinsi NTB mencapai 13,97 tahun dan RLS Provinsi NTB mencapai 7,74 tahun. Sedangkan dimensi ketiga yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran riil per kapita (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2023, pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan masyarakat NTB mencapai Rp11,1 juta per tahun. Capaian ini meningkat sebesar 3,88 persen dibandingkan tahun 2022, seiring dengan pemulihan ekonomi yang terus berlanjut. Setelah melalui pandemi COVID-19, Pengeluaran per riil kapita yang disesuaikan Provinsi NTB semakin membaik.

Berbagai terobosan telah dilakukan pemerintah provinsi NTB untuk menekan kematian bayi dan kematian ibu, yang salah satunya melalui revitalisasi posyandu.

Secara kuantitas, perkembangan jumlah Posyandu keluarga di NTB cukup signifikan, karena terjadi penambahan jumlah posyandu setiap tahun, sampai tahun 2023 jumlah posyandu menjadi Posyandu Keluarga sebanyak 7.676 Posyandu (100%). Revitalisasi ini dilakukan untuk menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan penurunan angka stunting. Secara kuantitas telah meningkat dan telah mencapai target yang diharapkan (100%), namun secara kualitas masih harus ditingkatkan lagi khususnya integrasi kegiatan/pelayanan, masih banyak yang belum terintegrasi, baik kegiatan Kesehatan maupun kegiatan dengan sector lain (PAUD, Bank Sampah, BKB, BUMDES, UMKM). Disamping itu, juga dilakukan determinasi terutama pada pernikahan dini, Adanya anggota keluarga yang merokok, pola asuh keluarga balita/Pemberian Makan bayi balita yang tidak tepat, Jaminan Pelayanan Kesehatan, Akses sanitasi dan air bersih dan ibu hamil serta remaja putri tidak mengkonsumsi gizi seimbang dan tablet tambah darah.

f. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Penduduk usia kerja pada Februari 2024 sebanyak 4,10 juta orang, naik sebanyak 68,22 ribu orang dibanding Februari 2023. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu sebanyak 3,03 juta orang (73,97 persen), sisanya termasuk bukan angkatan kerja. Komposisi angkatan kerja pada Februari 2024 terdiri dari 2,93 juta orang penduduk yang bekerja, meningkat sebanyak 169,99 ribu orang dari Februari 2023. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (101,55 ribu orang); Konstruksi (35,62 ribu orang); dan Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (22,44 ribu orang). Sebanyak 782,58 ribu orang (26,71 persen) bekerja pada kegiatan formal, naik 1,06 persen poin dibanding Februari 2023. Sebagian besar penduduk yang bekerja merupakan pekerja penuh (61,09 persen). Sementara pekerja paruh waktu dan setengah penganggur masing-masing sebesar 23,50 persen dan 15,41 persen. Adapun pengangguran mencapai 100,15 ribu orang, secara persentase, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2024 sebesar 3,30 persen, turun 0,42 persen poin dibandingkan dengan Februari 2023.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan dibanding Februari 2023. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap

banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. TPAK pada Februari 2024 sebesar 73,97 persen, naik 2,80 persen poin dibanding Februari 2023.

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja untuk masing-masing sektor. Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2024, tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu sebesar 32,76 persen; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 20,55 persen; dan Industri Pengolahan sebesar 9,21 persen. Dominasi lapangan pekerjaan ini dalam menyerap tenaga kerja masih sama, baik untuk Februari 2023 maupun Februari 2022

Grafik 3. 8 Proporsi Pekerja Penuh Dan Pekerja Tidak Penuh



3.2 Evaluasi terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah

Tahun 2024 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTB Tahun 2024-2026 sebagaimana telah ditetapkan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

Pencapaian terhadap tujuan dan sasaran pembangunan daerah didukung oleh berbagai program sebagaimana telah ditetapkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTB Tahun 2024 sebanyak 148 program prioritas dengan alokasi belanja daerah mencapai Rp6.205.414.024.675, dan realisasi sebesar Rp1.367.697.226.758,57 atau sebesar 22,04%, dan rata-rata capaian kinerja program masih nihil, dan rata-rata capaian kegiatan dan sub kegiatan sebesar 22,89%.

Adapun pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPD Provinsi NTB 2024-2026 pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah berdasarkan RPD 2024-2026 pada Tahun 2023 dan Triwulan I tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AKHIR PADA TAHUN 2026	2023			2024		
				TARGET	CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN TW I	TINGKAT CAPAIAN (%)
1	Kontribusi sektor gabungan lapangan usaha ekonomi yang berbasis pada sektor pertanian terhadap PDRB	%	55-57	49-50	49,96	101,96	50-53	47,31	96,55
2	Persentase peningkatan pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB	%	>10	>5	2,51	50,20	6,5	2,44	48,80
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	poin	74,62-75,46	70,09	72,37	103,25	73,11-73,96	NA	NA
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	79,65	73,18	71,92	98,28	75,34	NA	NA
5	Angka kemiskinan	%	<9	11,92	13,85	83,81	<10	NA	NA
6	Prevalensi Stunting	%	<10	16	13,49	115,69	14	NA	NA
7	Gini rasio	angka	0,358	0,37	0,375	98,65	0,366	NA	NA
8	Indeks Reformasi Birokrasi	poin	A	BB	B	97,07	BB	NA	NA
9	Persentase Capaian Indikator SDGs	%	76	56	56*	100,00	63	NA	NA
10	Indeks Daya Saing Daerah	poin	3,51	3,32	3,32*	100,00	3,35	NA	NA

Berdasarkan tabel diketahui bahwa dari 10 indikator kinerja utama daerah pada tahun 2023, terdapat 5 indikator yang telah memenuhi bahkan melampaui target sedangkan 5 indikator tidak sesuai target. Adapun indikator yang tidak mencapai target yaitu Persentase peningkatan pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Angka kemiskinan, Gini rasio, dan Indeks Reformasi Birokrasi. Sedangkan pada tahun 2024

sampai triwulan I terdapat 2 indikator yang sudah dapat diukur tetapi capaiannya belum memenuhi target. Adapun indikator yang sudah dapat diukur yaitu Kontribusi sektor gabungan lapangan usaha ekonomi yang berbasis pada sektor pertanian terhadap PDRB, dan Persentase peningkatan pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB.

3.3 Evaluasi terhadap Capaian Indikator Kinerja Daerah

Berdasarkan RPD Provinsi NTB 2024-2026, Indikator Kinerja Daerah meliputi 3 (tiga) aspek kinerja yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat; aspek pelayanan umum; serta aspek daya saing daerah, terdapat 238 indikator untuk mendeskripsikan ukuran kinerja daerah yang telah dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) aspek kinerja yaitu:

a. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat diukur dengan 8 indikator kinerja meliputi indikator Laju pertumbuhan ekonomi dengan tambang, Laju pertumbuhan ekonomi tanpa tambang, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat inflasi, Persentase kepesertaan jaminan sosial kesehatan/ Universal Health Coverage (UHC), Persentase kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Peningkatan Pendapatan per kapita, Tingkat Literasi Keuangan.

Adapun tingkat capaian aspek kesejahteraan sampai triwulan I Tahun 2024 dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 4 tingkat capaian aspek kesejahteraan masyarakat sampai triwulan I Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AKHIR PADA TAHUN 2026	2023			2024		
				TARGET	CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN TW I	TINGKAT CAPAIAN (%)
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Laju pertumbuhan ekonomi dengan tambang	%	6,2-7,8	5,5-6,9	1,80	32,73	5,8-7,1	4,75	86,36
2	Laju pertumbuhan ekonomi tanpa tambang	%	5,7-7,8	4,7-6,3	4,89	104,04	5,2-6,5	3,01	64,04
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,63	2,7-3,1	2,8	100,00	2,98	3,3	89,26
4	Tingkat inflasi	%	2-4	2-4	2,92	100,00	2-4	3,63	100,00
5	Persentase kepesertaan jaminan sosial kesehatan/ Universal Health Coverage (UHC)	%	100	90	97,5	108,33	95	97,5	102,63

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AKHIR PADA TAHUN 2026	2023			2024		
				TARGET	CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN TW I	TINGKAT CAPAIAN (%)
6	Persentase kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	65	32	32*	100,00	43	36,28	84,37
7	Peningkatan Pendapatan per kapita	%	>10	7	7*	100,00	8	NA	NA
8	Tingkat Literasi Keuangan	%	>67	65-67	65-67*	100,00	65-67	NA	NA

Berdasarkan tingkat capaian pada aspek kesejahteraan masyarakat, 6 indikator sudah dapat diukur capaiannya sampai triwulan I Tahun 2024 yaitu Laju pertumbuhan ekonomi dengan tambang, Laju pertumbuhan ekonomi tanpa tambang, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat inflasi, Persentase kepesertaan jaminan sosial kesehatan/ Universal Health Coverage (UHC), dan Persentase kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. sedangkan Peningkatan Pendapatan per kapita, Tingkat Literasi Keuangan. Dari 8 indikator aspek kesejahteraan masyarakat baru 2 indikator yang sudah memenuhi target sedangkan yang lainnya masih *on progress*. Indikator yang sudah memenuhi target yaitu inflasi dan Persentase kepesertaan jaminan sosial kesehatan/ Universal Health Coverage (UHC).

b. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah diukur dengan 7 indikator kinerja meliputi indikator Indeks Kriminalitas, Indeks Aksesibilitas, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana, Indeks Risiko Bencana, Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Pelayanan Publik.

Tabel 3. 5 tingkat capaian aspek daya saing daerah sampai triwulan I Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AKHIR PADA TAHUN 2026	2023			2024		
				TARGET	CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN TW I	TINGKAT CAPAIAN (%)
B	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	19,82	19,64	19,64*	100,00	19,7	NA	NA
2	Nilai SAKIP	kategori	A	BB	BB	100,00	A	NA	NA
3	Indeks Kapasitas Fiskal	poin	1,838-2,171	1,171-1,504	1,171-1,504*	100,00	1,504-1,838	NA	NA
4	Persentase capaian Pilar Pembangunan Sosial	%	80	60	60*	100,00	65	NA	NA

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AKHIR PADA TAHUN 2026	2023			2024		
				TARGET	CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN TW I	TINGKAT CAPAIAN (%)
5	Persentase capaian Pilar Pembangunan Ekonomi	%	75	55	55*	100,00	60	NA	NA
6	Persentase capaian Pilar Pembangunan Lingkungan	%	72	52	52*	100,00	67	NA	NA
7	Persentase capaian Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola	%	75	55	55*	100,00	60	NA	NA
8	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	poin	85	76,61	76,61*	100,00	77	NA	NA
9	Rasio konektivitas	%	96	93	93,14	100,15	94	NA	NA
10	Indeks Inovasi Daerah	poin	80	77	75,37	97,88	78	NA	NA

c. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum diukur dengan 91 indikator kinerja yang terdiri dari urusan wajib terkait pelayanan dasar sebanyak 21 indikator yang tersebar pada 6 urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib terkait pelayanan dasar sebanyak 32 indikator yang tersebar pada 18 urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan 20 indikator yang tersebar pada 8 urusan pilihan, serta fungsi penunjang urusan sebanyak 18 indikator yang tersebar 7 fungsi penunjang urusan.

Tabel 3. 6 tingkat urusan wajib pelayanan dasar sampai triwulan I Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AKHIR PADA TAHUN 2026	2023			2024		
				TARGET	CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN TW I	TINGKAT CAPAIAN (%)
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR								
1,01	Pendidikan								
1	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	10,94	8,69	7,74	89,07	9,39	NA	NA
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	18	15,05	13,97	92,82	16	NA	NA
3	Persentase pemenuhan SPM Pendidikan Menengah	%	100	100	98,50	98,50	100	NA	NA
4	Persentase pemenuhan SPM Pendidikan Khusus	%	100	100	87,74	87,74	100	NA	NA
5	Persentase penduduk dengan tingkat pendidikan menengah/ sederajat	%	36,53	35,78	35,78*	100,00	36,03	NA	NA
6	Persentase siswa/pelajar yang mengikuti pendidikan karakter	%	100	100	100*	100,00	100	NA	NA
7	Persentase siswa yang memiliki sertifikasi kemampuan dan	%	30	10-15	10*	100,00	16-20	NA	NA

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AKHIR PADA TAHUN 2026	2023			2024		
				TARGET	CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN TW I	TINGKAT CAPAIAN (%)
	keterampilan bahasa inggris (TOEFL/IELTS)								
8	Persentase sekolah yang melakukan pemilahan sampah sekolah	%	100% (10888 sekolah)	20% (2177 sekolah)	20% (2177 sekolah)*	100,00	25% (2722 sekolah)	NA	NA
9	Persentase lulusan SMK yang mendapatkan sertifikasi LSP P1	%	100	100	100*	100,00	100	NA	NA
10	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Retribusi dan LLPAD)	%	>15	6%	1.391,62	23.193,62	7-10	NA	NA
	* Angka Sementara								
1,02	Kesehatan								
1	Umur Harapan Hidup (UHH)	tahun	73,01-73,32	67,37	72,02	106,90	72,35-72,68	NA	NA
2	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100,000 KH	257-189	257	257	100,00	257-189	NA	NA
3	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1000 KH	24,64-16,85	24,64	24,64	100,00	24,64-16,85	NA	NA
4	Persentase pemenuhan SPM Pelayanan kesehatan bagi penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi	%	100	100	100	100,00	100	NA	NA
5	Persentase pemenuhan SPM Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB daerah provinsi	%	100	100	100	100,00	100	NA	NA
6	Persentase keluarga sehat pada setiap posyandu keluarga	%	85	60-70	15,01	25,02	71-75	NA	NA
7	Persentase Balita Stunting (e-PPBGM)	%	<10	16	13,49	115,69	14	NA	NA
8	Persentase sanitasi layak	%	91	85,09	83,12	97,68	87,06	NA	NA
9	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Rumah Sakit Mandalika (Retribusi)	%	>15	6%	1.101,67	18.361,20	7-10	NA	NA
10	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi (LLPAD)	%	>15	6%	53,09	884,89	7-10	NA	NA
11	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Rumah Sakit Mata (LLPAD)	%	>15	6%	-7,63	-127,15	7-10	NA	NA

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AKHIR PADA TAHUN 2026	2023			2024		
				TARGET	CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN TW I	TINGKAT CAPAIAN (%)
12	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Rumah Sakit Umum Provinsi (LLPAD)	%	>15	6%	32,16	536,03	7-10	NA	NA
13	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma (LLPAD)	%	>15	6%	37,08	617,93	7-10	NA	NA
14	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Rumah Sakit Manambai (LLPAD)	%	>15	6%	70,84	1.180,59	7-10	NA	NA
1,03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
1	Persentase sanitasi aman	%	17,01	8,4	5,53	65,83	11,27	NA	NA
2	Persentase pemenuhan SPM Pelayanan Pemenuhan Kebutuhan Air minum curah lintas kab/kota	%	100	100	100*	100,00	100	NA	NA
3	Persentase pemenuhan SPM Pelayanan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kab/kota	%	100	100	100*	100,00	100	NA	NA
4	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	89,67	81,44	76,38	93,79	84,10	NA	NA
5	Realisasi pembangunan infrastruktur dasar pada kawasan strategis	%	100%	25%	25%*	100,00	25%	NA	NA
6	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Konstruksi	%	2,6-3,3	2,6-3,2	10,87	418,08	2,6-3,1	9,46	363,85
7	Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	59,65	54,5	54,5	100,00	57,76	NA	NA
8	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dinas PUPR (Retribusi)	%	>15	6	54,08	901,37	7-10	NA	NA
	* Angka Sementara								
1,04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman								
1	Persentase pembangunan Rumah layak huni (RLH)	%	70,3	64,3	66,31	103,13	66,3	NA	NA
2	Persentase pemenuhan SPM Penyediaan dan Rehabilitasi rumah bagi korban bencana Provinsi	%	100	100	90,00	90,00	100	NA	NA

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AKHIR PADA TAHUN 2026	2023			2024		
				TARGET	CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN TW I	TINGKAT CAPAIAN (%)
3	Persentase pemenuhan SPM Fasilitas Penyediaan bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi	%	100	100	100,00	100,00	100	NA	NA
4	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Real Estate	%	1,7-2,2	1,7-2,1	4,40	258,82	1,7-2,1	3,89	228,82
1,05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat								
1	Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	%	100	100	100	100,00	100	NA	NA
2	Persentase penyelesaian pelanggaran produk hukum daerah	%	100	100	100	100,00	100	NA	NA
3	Persentase pemenuhan SPM ketentraman dan ketertiban umum Provinsi	%	100	100	100	100,00	100	NA	NA
4	Persentase pemenuhan SPM Bencana Daerah	%	100	100	100*	100,00	100	NA	NA
5	Indeks Kapasitas Daerah	poin	0,88	0,76	0,70	92,11	0,8	NA	NA
6	Cakupan Desa Tangguh Bencana	%	100 (732 destana)	100 (434 destana)	100,00	100,00	33 (242 destana)	NA	NA
7	Indeks Risiko Bencana (IRB)	poin	106,83	115,83	115,83	100,00	113,08	NA	NA
	* Angka Sementara								
1,06	Sosial								
1	Indeks Kesejahteraan Sosial	kategori	Baik	Kurang Baik	Kurang Baik*	100,00	Baik	NA	NA
2	Jumlah Kemiskinan ekstrem	%	0	2	2,64	68,00	0	NA	NA
3	Persentase pelayanan kepada kelompok rentan/disabilitas	%	70	10	10*		15	NA	NA
4	Persentase pemenuhan SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	%	100	100	100	100,00	100	NA	NA
5	Persentase pemenuhan SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	%	100	100	100	100,00	100	NA	NA
6	Persentase pemenuhan SPM Rehabilitasi Sosial	%	100	100	100	100,00	100	NA	NA

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AKHIR PADA TAHUN 2026	2023			2024		
				TARGET	CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN TW I	TINGKAT CAPAIAN (%)
	Dasar Lanjut Usia di dalam Panti								
7	Persentase pemenuhan SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	%	100	100	100	100,00	100	NA	NA
8	Persentase pemenuhan SPM Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi	%	100	100	100	100,00	100	NA	NA
9	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dinas Sosial (Retribusi)	%	>15	6%	0,00	0,00	7-10	NA	NA
	* Angka Sementara								
2,01	Tenaga Kerja								
1	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	poin	73,65	66,27	66,27*	100,00	68,73	NA	NA
2	Persentase peningkatan upah kerja (UMP)	%	5	5	2371407 (7,44)	201,49	5	NA	NA
3	Persentase peningkatan remittance	%	25	10	-18,35	-183,50	17	NA	NA
4	Persentase peningkatan penyediaan lapangan kerja melalui job fair	%	100	30	30*	100,00	30	NA	NA
5	Persentase pencari kerja yang bersertifikat keahlian	%	25,00	18,00	18,00*	100,00	20,00	NA	NA
6	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Retribusi)	%	>15	6	-12,12	-202,00	7-10	NA	NA
	* Angka Sementara								
2,02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
1	Indeks pembangunan gender	poin	90,72	90,61	90,61*	100,00	90,65	NA	NA
2	Indeks pemberdayaan gender	poin	55,24	53,97	53,97*	100,00	54,39	NA	NA
3	Rata-rata Usia Perkawinan Pertama Perempuan	tahun	20,59	20,49	20,49*	100,00	20,53	NA	NA
4	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	36,99	31,23	31,23*	100,00	33,15	NA	NA

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AKHIR PADA TAHUN 2026	2023			2024		
				TARGET	CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN TW I	TINGKAT CAPAIAN (%)
5	Cakupan Kab/kota yang mendapat penghargaan KLA tingkat madya dan nindya	%	100	50	40,00	80,00	60	NA	NA
	* Angka Sementara								
2,03	Pangan								
1	Indeks Ketahanan Pangan	poin	79,67	76,67	77,01*	100,44	77,67	NA	NA
2	Persentase konsumsi komoditi makanan terhadap total pengeluaran penduduk miskin	%	74,25	74,47	75,04	100,76	74,4	NA	NA
3	Persentase konsumsi komoditi bukan makanan terhadap total pengeluaran penduduk miskin	%	25,75	25,53	24,96	97,77	25,6	NA	NA
4	Polra Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	poin	98,9	95,7	94,70	98,96	96,8	NA	NA
	* Angka Sementara								
2,04	Lingkungan Hidup								
1	Indeks Kualitas Air	poin	47,9	44,3	47,78	107,86	45,71	NA	NA
2	Indeks Kualitas Udara	poin	97,68	87,59	90,21	102,99	87,62	NA	NA
3	Persentase implementasi program pengurangan emisi dari aksi mitigasi sektor/subsektor Energi/pembangkit, Transportasi, Bangunan, Limbah padat, Limbah cair, Sampah, Industri, Persawahan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Blue carbon	%	100	10	10*	100,00	30	NA	NA
4	Persentase implementasi program pengurangan emisi dari aksi adaptasi dalam bidang Pangan, Air, Energi, Kesehatan, Ekosistem	%	100	10	10*	100,00	30	NA	NA
5	Persentase pengurangan dan penanganan sampah	%	100	84	65,31	77,75	90	NA	NA
6	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	%	5,3-6,6	5,3-6,5	3,84	100,00	5,3-6,3	4,47	100,00
7	Pemilahan sampah rumah tangga	%	100	20-30	20-30	100,00	31-50	NA	NA
8	Pemilahan sampah perkantoran	%	100	60	60	100,00	70	NA	NA

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AKHIR PADA TAHUN 2026	2023			2024		
				TARGET	CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN TW I	TINGKAT CAPAIAN (%)
9	Pemilahan sampah area publik	%	100	10-30	10-30	100,00	31-60	NA	NA
10	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada DLHK (Retribusi dan LLPAD)	%	>15	6	-24,21	-403,52	7-10	NA	NA
	* Angka Sementara								
2,05	Pertanahan								
1	Persentase fasilitasi penyelesaian tanah objek reforma agraria (TORA)	%	100	100	100*	100,00	100	NA	NA
2	Cakupan konflik pertanahan yang difasilitasi	%	100	100	100	100,00	100	NA	NA
	* Angka Sementara								
2,06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
1	Persentase perekaman KTP	%	100	100	99,05	99,05	100	NA	NA
2	Rasio Penduduk BerKTP Persatuan Penduduk	%	100	100	99,16	99,16	100	NA	NA
2,07	Pemberdayaan Masyarakat Desa								
1	Persentase desa mandiri dan maju	%	68	63	71,69	113,79	65	NA	NA
2,08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
1	Pertumbuhan penduduk (%)	%	1,11	1,64	1,58	103,66	1,46	NA	NA
2	mCPR (modern Contraceptive Prevalence Rate) : PUS yang menggunakan alat kontrasepsi modern	%	>80	65,0	60,20	92,62	75,0	NA	NA
2,09	Perhubungan								
1	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Transportasi dan Pergudangan	%	8,2-10	8,2-10	8,14	99,27	8,2-9,8	4,63	56,46
2	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Angkutan Darat	%	8,1-10	8,1-9,9	6,00	74,07	8,1-9,7	NA	NA
3	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Angkutan Laut	%	7,6-9,4	7,6-9,3	2,14	28,16	7,6-9,1	NA	NA
4	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Angkutan	%	7,0-8,8	7,0-8,6	7,60	100,00	7,0-8,4	NA	NA

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AKHIR PADA TAHUN 2026	2023			2024		
				TARGET	CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN TW I	TINGKAT CAPAIAN (%)
	Sungai Danau dan Penyeberangan								
5	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Angkutan Udara	%	10-12,5	10-12,3	16,43	133,58	10-12	NA	NA
6	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Perdagangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	%	8,2-10	8,2-10	5,06	61,71	8,2-9,8	NA	NA
	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dishub (Retribusi dan LLPAD)			6	7,52	125,29		NA	NA
2,1	Komunikasi dan Informatika								
1	Tingkat literasi digital	%	100	35	35*	100,00	61	NA	NA
2	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Informasi dan Komunikasi	%	7,6-9,4	7,6-9,3	4,88	64,21	7,6-9,1	8,16	107,37
3	Kualifikasi Layanan Perangkat Daerah	kategori	Kolaborasi	Kolaborasi	Kolaborasi	100,00	Kolaborasi	NA	NA
4	Persentase Perangkat Daerah yang Informatif	%	100	75	55,65	74,20	75	NA	NA
	* Angka Sementara								
2,11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
1	Persentase jumlah start up (perusahaan rintisan) yang berkembang dari pelatihan kewirausahaan	%	7-10	2-3	3*	100,00	4-5	NA	NA
2	Pertumbuhan produktivitas Subsektor KUKM	%	5	4,74	4,74*	100,00	4,8	NA	NA
3	Koperasi Modern	%	60	30	3 Koperasi	66,67	40	NA	NA
4	Persentase peningkatan penerimaan PAD Dinas Koperasi dan UMKM (Retribusi)	%	>15	6	-17,14	-285,60	7-10	NA	NA
	* Angka Sementara								
2,13	Kepemudaan dan Olah Raga								
1	Peningkatan prestasi olahraga tingkat nasional dan internasional	%	30	5	60,92	1.218,40	7	NA	NA
2	Prestasi Pemuda di tingkat nasional dan internasional	orang	15	15	11	73,33	15	NA	NA

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AKHIR PADA TAHUN 2026	2023			2024		
				TARGET	CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN TW I	TINGKAT CAPAIAN (%)
3	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dispora (Retribusi)	%	>15	6	4,26	70,94	7-10	NA	NA
2,14	Statistik								
1	Persentase penyediaan data statistik sektoral provinsi dan kabupaten/kota	%	100	27	27*	100,00	27	NA	NA
2	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Data yang Berkualitas	%	100	65	92,07	141,65	65	NA	NA
	* Angka Sementara								
2,15	Persandian								
1	Persentase aplikasi SPBE yang aman	%	100	30	69,81	232,70	20	NA	NA
2	Indeks Kematangan Keamanan Informasi	level	IV	III+	III	90,00	III+	NA	NA
2,16	Kebudayaan								
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	poin	>60	54-60	56,60	104,81	54-60	NA	NA
2,17	Perpustakaan								
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	poin	70-75	65	66,32	102,03	68,5	NA	NA
2	Persentase jangkauan layanan perpustakaan mobile ke desa	%	100	15	15 (desa)	100,00	20	NA	NA
2,18	Kearsipan								
1	Persentase Arsip yang Terselamatkan	%	100	100	94,50	94,50	100	NA	NA
3,01	Kelautan dan Perikanan								
1	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Perikanan	%	2,7-3,4	2,7-3,4	2,56	94,81	2,7-3,3	NA	NA
2	Produksi Perikanan	ton	1.599.723	1.499.957	1.499.957 *	100,00	1.532.501	NA	NA
3	Nilai Tukar Nelayan	poin	114	110	108,25	98,41	112	NA	NA
4	Kontribusi PDRB Subsektor Perikanan	%	5,17	4,79	4,68	97,70	5,07	NA	NA
5	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dinas Kelautan dan Perikanan (Retribusi)	%	>15	6	28,75	479,24	7-10	NA	NA
	* Angka Sementara								
3,02	Pariwisata								
1	Persentase kota kreatif	%	100	0	0,00	0,00	30	NA	NA
2	Persentase SDM kepariwisataan dengan sertifikasi	%	1372 (100%)	343 (25%)	25*	100,00	343 (25%)	NA	NA

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AKHIR PADA TAHUN 2026	2023			2024		
				TARGET	CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN TW I	TINGKAT CAPAIAN (%)
	kompetensi dan bahasa asing								
3	Persentase pengembangan geosite geopark sebagai lokasi pengembangan green economy dan destinasi eco tourism	%	73 (100%)	29 (40%)	40*	100,00	44 (60%)	NA	NA
4	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	27,6-34,8	16,3-32,8	8,97	55,03	20,7-32,6	3,97	24,36
5	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Penyediaan Akomodasi	%	34-42,2	20,7-41,6	9,70	46,86	26-40,7	NA	NA
6	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Penyediaan Makan Minum	%	20,4-25,4	12,4-25	8,33	67,18	15,6-24,5	NA	NA
7	Pemilahan sampah perhotelan/destinasi pariwisata	%	100	10-15	10*	100,00	16-30	NA	NA
8	Pemilahan sampah rumah makan dan restoran	%	100	10-30	10*	100,00	31-60	NA	NA
9	Persentase Desa Wisata yang berprestasi nasional dan internasional	%	100	100	10*	100,00	100	NA	NA
10	Rata-rata Lama Menginap	hari	3,51	3,35	1,89	56,42	3,45	NA	NA
11	Angka kunjungan wisatawan	orang	3.579.393	1.376.295	1.576.564	114,55	1.690.297	NA	NA
12	Angka Kunjungan Wisata Nusantara	%	25	10	-5,98	-59,76	15	NA	NA
13	Angka Kunjungan Wisata Mancanegara	%	150	100	219,18	219,18	100	NA	NA
14	Persentase peningkatan nilai investasi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	%	20	N/A	2*		10		
15	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dinas Pariwisata (Retribusi)	%	>15	6	2.779,80	17.054,01	7-10	NA	NA
	* Angka Sementara								
3,03	Pertanian								
1	Persentase peningkatan upah kerja pada lapangan usaha pertanian	%	1.137.312 (10%)	854.480 (10%)	10,0*	100,00	939.928 (10%)	NA	NA
2	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	3,7-4,6	3,7-4,6	2,05	55,41	3,7-4,5	-4,13	-111,62
3	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Pertanian, Peternakan,	%	4,0-4,9	4,0-4,8	1,94	48,50	4,0-4,7	NA	NA

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AKHIR PADA TAHUN 2026	2023			2024		
				TARGET	CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN TW I	TINGKAT CAPAIAN (%)
	Perburuan dan Jasa Pertanian								
4	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Tanaman Pangan	%	4,5-5,6	4,5-5,6	1,39	30,89	4,5-5,4	NA	NA
5	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Tanaman Hortikultura	%	2,7-3,4	2,7-3,3	1,08	40,00	2,7-3,3	NA	NA
6	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Perkebunan	%	1,8	1,8	0,56	31,11	1,8	NA	NA
7	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Jasa Pertanian dan Perburuan	%	4,0-4,9	5,2-6,0	2,20	42,31	4,0-4,7	NA	NA
8	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Peternakan	%	4,2-5,2	4,2-5,1	4,51	107,38	4,2-5,0	NA	NA
9	Nilai Tukar Petani	poin	>105	>105	122,81	116,96	>105	NA	NA
10	Kontribusi PDRB Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	%	16,78	16,80	17,48	104,05	16,52	NA	NA
11	Kontribusi PDRB Sektor Peternakan	%	3,85	3,70	3,78	102,16	3,75	NA	NA
12	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Retribusi dan LLPAD)	%	>15	6	-44,34	-738,92	7-10	NA	NA
13	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dinas Pertanian dan Perkebunan (Retribusi)	%	>15	6	-48,90	-814,92	7-10	NA	NA
3,04	Kehutanan								
1	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	poin	65,51	65,58	66,60	101,56	65,56	NA	NA
2	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Kehutanan dan Penebangan Kayu	%	3,5-4,3	1,9-4,3	0,37	19,47	3,5-4,2	NA	NA
3	Persentase penanganan lahan kritis	%	>5	2-3	2*	100,00	3-4	NA	NA
4	Persentase pemulihan sumber-sumber mata air yang telah hilang	%	26-35	10-15	10*	100,00	16-20	NA	NA
5	Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging	%	100	100	100*	100,00	100	NA	NA

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AKHIR PADA TAHUN 2026	2023			2024		
				TARGET	CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN TW I	TINGKAT CAPAIAN (%)
6	Persentase desa mandiri (keluar dari kantong kemiskinan) di sekitar lingkaran hutan	%	100% (200 desa lingkaran hutan)	287 desa yang keluar dari kemiskinan/ mandiri			30 % dari 200 desa miskin	NA	NA
	* Angka Sementara								
3,05	Energi dan Sumberdaya Mineral								
1	Bauran energi baru terbarukan	%	25	19,18	19,18*	100,00	20,99	NA	NA
2	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Pertambangan dan Penggalian	%	7,9-9,9	8,7-9,5	-10,39	-119,43	7,8-9,4	12,48	143,45
4	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Pertambangan dan Penggalian Lainnya	%	2,5-3,2	2,5-3,1	6,47	258,80	2,5-3,0	NA	NA
5	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Pengadaan Listrik dan Gas	%	6,7-8,3	6,7-8,2	5,04	75,22	6,7-8,0	6,50	97,01
6	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Ketenagalistrikan	%	6,7-8,3	6,7-8,2	5,04	75,22	6,7-8,0	NA	NA
	* Angka Sementara								
3,06	Perdagangan								
1	Persentase peningkatan ekspor	%	>100	80-90	-33,86%	-5,05	91-95	NA	NA
2	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	7,2-8,8	6,3-8,6	6,94	103,58	6,7-8,4	3,79	56,57
3	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	%	5,7-7,1	5,7-7,0	14,53	254,91	5,7-6,9	NA	NA
4	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	%	7,5-9,1	6,4-8,8	5,69	88,91	6,9-8,7	NA	NA
5	Pemilahan sampah pasar	%	100	10-30	10*	100,00	31-60	NA	NA
6	Pengeluaran Per Kapita	Rp, Ribu	11.954	10.910	11.095,00	101,70	11.364	NA	NA
3,07	Perindustrian								

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AKHIR PADA TAHUN 2026	2023			2024		
				TARGET	CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN TW I	TINGKAT CAPAIAN (%)
1	Persentase peningkatan upah kerja pada lapangan usaha industri	%	35	638M-753M	3,50		10	NA	NA
2	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Industri Pengolahan	%	4,0-5,0	3,6-4,8	2,51	69,72	3,9-4,7	2,44	67,78
3	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Industri Makanan dan Minuman	%	2,7-3,4	2,7-3,4	2,89	107,04	2,7-3,3	NA	NA
4	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Industri Pengolahan Tembakau	%	5,3-6,6	5,3-6,5	0,79	29,26	5,3-6,4	NA	NA
5	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	%	4,8-5,9	4,8-5,8	4,28	158,52	4,8-5,7	NA	NA
6	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	%	7,6-9,5	4,2-9,4	2,06	49,05	7,6-9,2	NA	NA
7	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	%	3,8-4,6	1,6-2,8	7,27	454,38	3,4-4,4	NA	NA
8	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	%	3,7-4,7	3,8-4,6	1,02	26,84	3,7-4,5	NA	NA
9	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	%	3,3-4,1	3,3-4,0	4,11	124,55	3,3-3,9	NA	NA
10	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Industri Barang Galian bukan Logam	%	2,4-3,1	2,4-3,0	3,48	145,00	2,4-2,9	NA	NA
11	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Industri Logam Dasar	%	4,5-5,6	4,9-5,4	3,46	70,61	4,4-5,3	NA	NA
12	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	%	4,5-5,4	3,7-5,2	3,39	91,62	4,0-5,1	NA	NA
13	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Industri Alat Angkutan	%	4,5-5,6	4,4-5,5	0,48	10,91	4,4-5,4	NA	NA

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AKHIR PADA TAHUN 2026	2023			2024		
				TARGET	CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN TW I	TINGKAT CAPAIAN (%)
14	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Industri Furnitur	%	7,0-8,8	3,9-8,6	5,69	145,90	7,0-8,4	NA	NA
15	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	%	4,0-5,0	8,7-10	1,47	16,90	3,9-4,7	NA	NA
16	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dinas Perindustrian (Retribusi)	%	>15	6	-5,06	-84,27	7-10	NA	NA
	* Angka Sementara								
3,08	Transmigrasi								
1	Persentase satuan permukiman transmigrasi yang dikembangkan	%	29	23,61	23,61*	100,00	25	NA	NA
2	Persentase transmigran yang sejahtera dan mandiri	%	51,4	49	49,0*	100,00	49,53	NA	NA
	* Angka Sementara								
4,01	Administrasi Pemerintahan								
1	Capaian prestasi daerah	angka	30	25	25*	100,00	27	NA	NA
2	Persentase rumah ibadah yang telah dibantu/difasilitasi	%	5870 (100%)	3576 (25%)	83,70	334,80	4341 (25%)	NA	NA
3	Persentase pondok pesantren/lembaga pendidikan agama yang telah dibantu/difasilitasi	%	730 (100%)	382 (25%)	86,32	345,28	498 (25%)	NA	NA
4	Persentase program distribusi Baznas NTB untuk pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, ekonomi produktif, dakwah dan advokasi	%	95-100	95-100	95*	100,00	95-100	NA	NA
5	Indeks Pelayanan Publik	poin	>3,9	3,75	3,97	105,87	3,8	NA	NA
6	Persentase perjanjian kerjasama regional dan internasional yang telah diselesaikan dari MoU yang telah disepakati	%	80 (100%)	20 (25%)	25*	100,00	20 (25%)	NA	NA
7	Pemilahan sampah madrasah/pondok pesantren	%	100%	30% (799 Ponpes)	30*	100,00	30% (799 Ponpes)	NA	NA
8	Jumlah Lapangan usaha yang berkembang dari prospektif menjadi unggul	lapangan usaha	19	15	15*	100,00	17	NA	NA

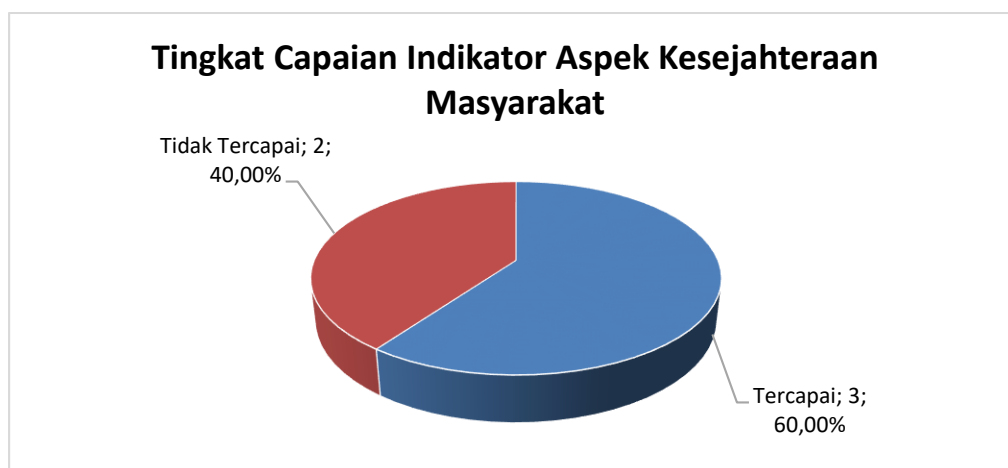
NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AKHIR PADA TAHUN 2026	2023			2024		
				TARGET	CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN TW I	TINGKAT CAPAIAN (%)
9	Jumlah lapangan usaha yang berkembang dari andal menjadi prospektif	lapangan usaha	22	15	15*	100,00	17	NA	NA
10	Jumlah lapangan usaha yang berkembang dari tertinggal menjadi andal	lapangan usaha	11	18	18*	100,00	15	NA	NA
11	Persentase peningkatan penerimaan PAD (Retribusi)	%	>15	6	34,67	577,80	7-10	NA	NA
12	Persentase peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	%	>15	6	34,71	578,49	7-10	NA	NA
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
	* Angka Sementara								
5,01	Perencanaan								
1	Indeks perencanaan pembangunan daerah	kategori	Sangat Baik	Baik	Baik	100,00	Baik	NA	NA
2	Perkembangan jumlah mitra pembangunan	angka	173	143	98,00	68,53	153	NA	NA
	* Angka Sementara								
2	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Jasa Perantara Keuangan	%	5,4-6,8	5,4-6,7	-3,09	100,00	5,4-6,5	NA	NA
3	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Asuransi dan Dana Pensiun	%	6,3-7,8	6,3-7,7	3,56	100,00	6,3-7,6	NA	NA
4	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Jasa Keuangan Lainnya	%	6,6-8,2	6,6-8,0	6,61	100,00	6,6-7,9	NA	NA
5	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Jasa Penunjang Keuangan	%	5,8-7,3	5,8-7,2	5,12	100,00	5,8-7,0	NA	NA
6	Persentase pertumbuhan PAD	%	19,21	30,5	21,63	70,93	2,95	NA	NA
7	Peningkatan Pendapatan transfer	%	0,46	0,01	0,03	342,18	-4,5	NA	NA
8	Peningkatan lain-lain pendapatan daerah yang sah	%	0	-97,22	58,68	-60,36	-100	NA	NA
9	Kepatuhan ketentuan alokasi pendidikan	%	20	20	24,08	120,40	20	NA	NA
10	Kepatuhan ketentuan alokasi kesehatan	%	10	10	29,16	291,60	10	NA	NA
11	Kepatuhan ketentuan alokasi infrastruktur	%	25% dari penerimaan dana transfer	25% dari penerimaan dana transfer	16,02	64,08	25% dari penerimaan	NA	NA

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AKHIR PADA TAHUN 2026	2023			2024		
				TARGET	CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN TW I	TINGKAT CAPAIAN (%)
							dana transfer		
12	Kepatuhan ketentuan alokasi pengawasan	%	0,6% dari APBD (Rp 4-10T)	0,6% dari APBD (Rp 4-10T)	0,43	71,67	0,6% dari APBD (Rp 4-10T)	NA	NA
13	Kepatuhan terhadap ketentuan alokasi kebencanaan	%	1% dari APBD	1% dari APBD			1% dari APBD	NA	NA
14	Persentase peningkatan retribusi dan LLPAD pada BPKAD	%	>15	6	568,50	9.474,92	7-10	NA	NA
	* Angka Sementara								
5,03	Kepegawaian								
1	Indeks Profesionalisme ASN	poin	0,76	0,71	0,77	108,45	0,73	NA	NA
2	Dimensi Kualifikasi	%	14	14	0,21	1,50	14	NA	NA
3	Dimensi Kinerja	%	25	25	24,94	99,76	25	NA	NA
4	Dimensi Disiplin	%	5	5	5	100,00	5	NA	NA
5,04	Pendidikan dan Pelatihan								
1	Dimensi kompetensi	%	32	27	26,22	97,11	29	NA	NA
2	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada BPSDM (Retribusi dan LLPAD)	%	>15	6	-19,13	-318,89	7-10	NA	NA
5,05	Penelitian dan Pengembangan								
1	Persentase peningkatan penerima beasiswa NTB	%	8952	15%	15*	100,00	15%	NA	NA
2	Jumlah Inovasi dan teknologi yang telah diadopsi dan diterapkan dalam skala industri	unit	75-100	20-25	20*	100,00	25-50	NA	NA
	* Angka Sementara								
5,06	Penghubung								
1	Tingkat kepuasan pelayanan penghubung	%	>97	86-90	95	110,47	91-95	NA	NA
2	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Badan Penghubung (Retribusi)	%	>15	6	15,72	262,03	7-10	NA	NA
6,01	Pengawasan								
1	Penurunan temuan	%	<5	<5	3*	540,00	<5	NA	NA
2	Opini BPK	kategori	WTP	WTP	WTP	100,00	WTP	NA	NA

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AKHIR PADA TAHUN 2026	2023			2024		
				TARGET	CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN TW I	TINGKAT CAPAIAN (%)
	* Angka Sementara								
7,01	Kesatuan Bangsa dan Politik								
1	Persentase penanganan konflik SARA	%	100	6 kasus (50%)	2 kasus*	666,67	100	NA	NA
2	Indeks Demokrasi	poin	78,75	76,83	76,83*	100	77,47	NA	NA
3	Persentase kelompok masyarakat yang mengikuti pendidikan karakter bangsa	%	100%	25%	25*	100,00	25%	NA	NA
4	Cakupan mediator bale mediasi yang dilatih	%	5,55	4,89	4,48*	100,00	5,11	NA	NA
	* Angka Sementara								

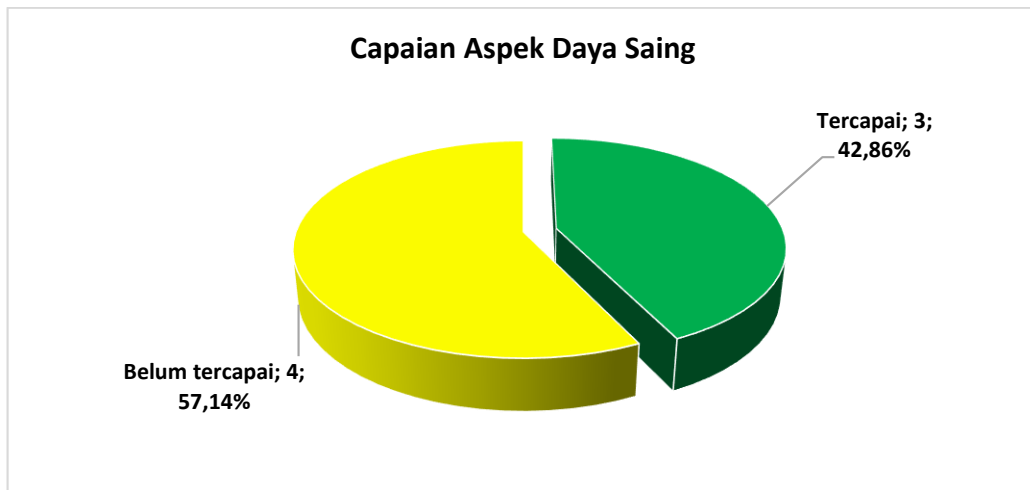
Dari 5 indikator untuk mengukur aspek kesejahteraan masyarakat, terdapat 3 indikator tercapai atau memenuhi target yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sedangkan 2 indikator yang tidak memenuhi target yaitu tingkat kemiskinan, dan gini rasio (ketimpangan).

Grafik 3. 9 Capaian aspek kesejahteraan masyarakat



Sedangkan pada aspek daya saing daerah, dari 7 indikator untuk mengukur aspek daya saing daerah, terdapat 3 indikator tercapai atau memenuhi target yaitu Indeks Kriminalitas, Indeks Aksesabilitas, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), sedangkan 4 indikator yang tidak memenuhi target yaitu Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana, Indeks Risiko Bencana, Indeks Reformasi Birokrasi, dan Indeks Pelayanan Publik.

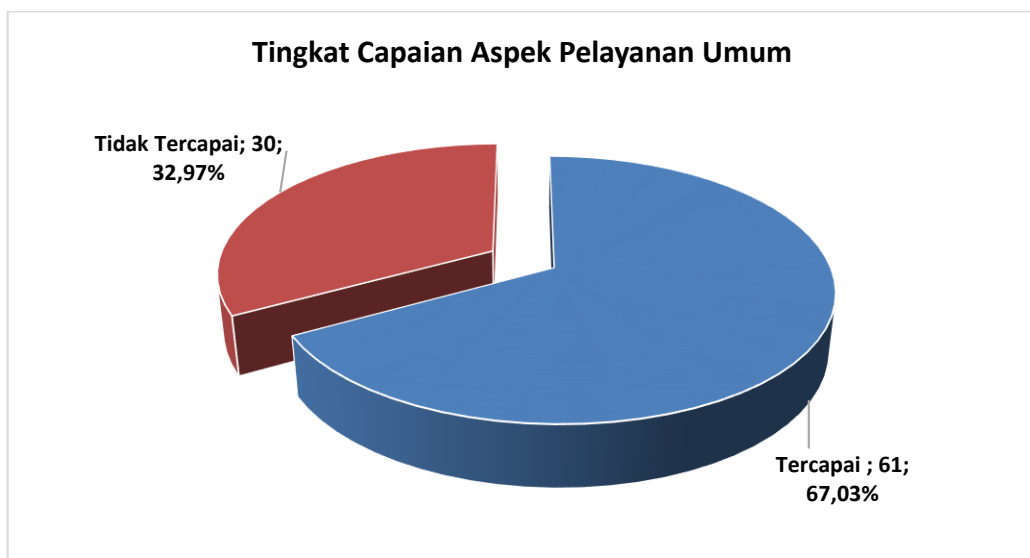
Grafik 3. 10 Proporsi Tingkat Capaian Aspek Daya Saing Daerah



Sumber : BAPPEDA Provinsi NTB, 2023

Adapun aspek pelayanan umum, pencapaiannya sebesar 67,03% atau sebanyak 61 indikator dari 91 total indikator kinerja pelaksanaan pelayanan umum.

Grafik 3. 11
Proporsi tingkat capaian Aspek Pelayanan Umum



Sumber : BAPPEDA Provinsi NTB, 2023

Dari 91 indikator untuk mengukur aspek pelayanan umum, terdapat 61 indikator tercapai atau memenuhi target bahkan melampaui target, sedangkan 30 indikator tidak mencapai target. Beberapa indikator yang tercapai antara lain: Persentase PMKS yang tertangani, Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (lokus NTB), Cakupan Desa Tangguh Bencana (434 Desa Rawan Bencana), Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah, Prestasi olahraga di tingkat nasional dan

internasional, Nilai Realisasi Investasi, Persentase unit pelayan publik perangkat daerah yang menerapkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum), Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik, Persentase Balita Stunting, Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Data yang Berkualitas, Persentase Industri kecil yang meningkat menjadi industri menengah, Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan, Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD, Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional, Indeks Kualitas Air Laut, Indeks Kapasitas Daerah, Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Penduduk BerKTP Persatuan Penduduk, Indeks Kualitas Air, Indeks Kesehatan, Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan, Rata-rata Lama Sekolah, Persentase Desa dengan status berkembang, maju, dan mandiri, Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi, Cakupan desa pesisir, dan lingkaran hutan yang diberdayakan, Persentase Digitalisasi Koleksi Deposit (7527 Judul), Indeks Profesionalisme ASN, Angka Harapan Hidup, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Persentase konektivitas transportasi publik, Persentase Kemantapan Sistem Irigasi, Persentase Koperasi Aktif, Cakupan Air Minum, Indeks Kualitas Udara, Indeks Pendidikan, Ranking Nasional LPPD, Harapan Lama Sekolah, Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak, Indeks Pembangunan Gender (IPG), Cakupan Cagar Budaya yang direvitalisasi, Proporsi wirausaha muda, Pertumbuhan Industri, Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan, Tingkat Penanganan Pelanggaran Gangguan Trantibmas, Tingkat Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah, Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial, Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak, Cakupan konflik pertanahan yang difasilitasi, Kualifikasi Layanan Perangkat Daerah, Prestasi Pemuda di tingkat nasional dan internasional, Cakupan Komunitas Literasi yang terbina (59 Komunitas), Persentase Arsip yang Terselamatkan, Persentase Desa Wisata yang dikembangkan, Nilai Tukar Petani, Rasio Elektrifikasi, Cakupan Penempatan Transmigran, Persentase Penyusunan Produk Hukum Daerah yang berkualitas, Persentase Fasilitas Pelayanan Keagamaan, Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan, dan Opini BPK.

Adapun indikator yang tidak tercapai meliputi: Kontribusi sektor Perikanan terhadap PDRB, Rata-rata Usia Perkawinan Pertama Perempuan, Nilai Tukar Nelayan, Persentase Kemantapan jalan, Indeks Daya Beli, Partisipasi Politik Masyarakat,

Cakupan Rumah Layak Huni (RLH), Indeks Kualitas Tutupan Lahan, Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum). Indeks Kematangan Keamanan Informasi , Pengeluaran per kapita, Indeks Profesionalisme ASN Dimensi Kompetensi, Persentase Penyusunan Regulasi Rencana Tata Ruang (RTR), Nilai SAKIP, Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Produksi Perikanan, Cakupan mediator bale mediasi yang dilatih, Cakupan Komunitas "Sekolah Perjumpaan" yang terbentuk dalam rangka Pendidikan Karakter, Persentase Perangkat Daerah yang Informatif, Persentase Penanganan Sampah, Neraca Pengelolaan Sampah (%), Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan, Rata-rata Lama Menginap, Cakupan Luas Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Lainnya, Persentase Pengurangan Sampah, Angka kunjungan wisatawan, Persentase penurunan konflik sosial, Pertumbuhan Penduduk, dan Persentase Geosites yang Tertata.

3.4 Evaluasi terhadap Capaian Pelaksanaan Program Prioritas

Berdasarkan program-program sebagaimana telah ditetapkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTB Tahun 2024 sebanyak 120 program prioritas dengan alokasi belanja daerah mencapai Rp6.261.613.644.550,00, dan realisasi sebesar Rp5.686.300.429.147,25 atau sebesar 90,81%, dan rata-rata capaian kinerja program sebesar 90,97%. Adapun capaian pelaksanaan program prioritas tahun 2023 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Capaian Program Prioritas berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah sampai Triwulan I Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPD pada tahun 2026		Target RKPD/Renja 2024		REALISASI % Tingkat Capaian				Perangkat Daerah
				Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	
I	TERWUJUDNYA TRANSFORMASI EKONOMI MELALUI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAERAH MENUJU NTB SEBAGAI LOKOMOTIF PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL BALI DAN NUSA TENGGARA YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN	Kontribusi sektor gabungan lapangan usaha ekonomi yang berbasis pada sektor pertanian terhadap PDRB	%	55-57		50-53		47,31		96,55		
		Persentase peningkatan pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB	%	>10		6,5		2,44		48,80		
	1 Meningkatkan lapangan kerja dan produktivitas daerah	Laju pertumbuhan ekonomi dengan tambang	%	6.2-7.8		5.8-7.1		4,75		86,36		
		Laju pertumbuhan ekonomi tanpa tambang	%	5.7-7.8		5.2-6.5		3,01		64,04		
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,63		2,98		3,3		100,00		
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Cakupan luas wilayah laut pesisir dan pulau pulau kecil yang dikelola secara berkelanjutan	Persen	6,73	3.917.698.181	4,56	3.863.608.402	6	119.622.150	100,80	1,84	Dinas Kelautan dan Perikanan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	272276	20.899.885.534	261703	22.819.367.645	19.087	155.956.800	7,29	0,92	Dinas Kelautan dan Perikanan
	PROGRAM PENGELOLAAN	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	993194	4.973.744.707	973624	4.780.608.138	194.725	63.854.000	20,00	1,21	Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPD pada tahun 2026		Target RKPD/Renja 2024		REALISASI		% Tingkat Capaian		Perangkat Daerah
				Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	
	PERIKANAN BUDIDAYA											
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha perikanan dan kelautan	Persen	83 - 100	1.623.538.432	80 - 100	1.560.494.456	22	30.555.000		4,22	Dinas Kelautan dan Perikanan
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi olahan hasil perikanan	Ton	186807	246.328.407	176083	236.763.175	42.290	5.343.000	24,02	7,41	Dinas Kelautan dan Perikanan
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Peningkatan Keberhasilan Sistem Pelayanan dan Pengawasan Terintegrasi Angkutan Laut dan Penyeberangan	Persen	8,08	2.967.241.344	4,49	5.212.308.140	20	19.310.000	50	16	Dinas Perhubungan
		Persentase Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	Persen	80		20						Dinas Perhubungan
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				1.146.000.000		632.000.000		9.284.472	2,5	2,5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				1.507.000.000		1.183.000.000		46.102.000	14,19	15,98	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Dok	6	21.661.355.429	6	17.745.940.625		-			Dinas Perindustrian

No	Tujuan/Sasaran/Program		Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPD pada tahun 2026		Target RKPD/Renja 2024		REALISASI		% Tingkat Capaian		Perangkat Daerah
					Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya Populasi Ternak Sapi, Kerbau, Kambing dan Unggas	ekor	Sapi 1.332.891 Ekor, Kerbau 105.487 Ekor, Kambing 755.091 Ekor dan Unggas 68.079.137 Ekor	73.729.375.000	Sapi 1.256.378 Ekor, Kerbau 103.409 Ekor, Kambing 684.890 Ekor dan Unggas 53.539.508 Ekor	55.750.000.000		77.650.000		0,49	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat Kemanfaatan Prasarana Pertanian	Persen	75	2.380.500.000	75	1.800.000.000		77.650.000		0,49	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Ternak Yang Terinfeksi PHMS	Persen	5	10.381.625.000	5	7.850.000.000		61.320.840		10,83	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Produk Peternakan yang berhasil di pasarkan	Persen	100	1.388.625.000	100	1.050.000.000	#####	5.405.000		2,78	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Angka Kunjungan Wisatawan	Persen	25	3.914.350.000	15	3.235.000.000					Dinas Pariwisata
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Cakupan Pengawasan Legalitas/ Perizinan Bahan Berbahaya,	Persen	80	580.800.000	60	480.000.000	20,0	5.920.000	25,0	11,84	Dinas Perdagangan

No	Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPD pada tahun 2026		Target RKPD/Renja 2024		REALISASI		% Tingkat Capaian		Perangkat Daerah
				Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	
		Minuman Beralkohol dan Barang Pokok Penting										
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Cakupan Penyelesaian Sengketa	Persen	90	1.815.000.000	85	1.500.000.000	40,0	567.000.000	44,444	29,66	Dinas Perdagangan
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Fasilitas Sarana Pertanian	Persen		71.020.560.000		74.971.346.000		761.230.000		7,46	Dinas Pertanian dan Perkebunan
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Fasilitas Prasarana Pertanian	Persen		85.350.085.000		76.600.085.000	-	14.720.621.500	-	19,33	Dinas Pertanian dan Perkebunan
		Persentase Peningkatan Penerapan LP2B	Persen	100		90						Dinas Pertanian dan Perkebunan
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Pengendalian OPT dan Penanganan DPI	Persen	67,9	3.625.850.000	67,7	3.357.100.000					Dinas Pertanian dan Perkebunan
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	SDM Pertanian yang meningkat kapasitasnya	Persen	70	6.750.160.000	60	5.841.000.000	-	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perkebunan
		Petani yang menerapkan teknologi	Persen	80		70			41.600.000	-	16,64	Dinas Pertanian dan Perkebunan
		Kelembagaan Petani yang meningkat kapasitasnya	Persen	20		18		-	50.000.000		16,67	Dinas Pertanian dan Perkebunan
	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Pengelolaan DAS yang Dioptimalkan	Persen	100	283.100.000	100	235.000.000					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Tujuan/Sasaran/Program		Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPD pada tahun 2026		Target RKPD/Renja 2024		REALISASI		% Tingkat Capaian		Perangkat Daerah
					Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	
II	TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS MANUSIA YANG KOMPETITIF, UNGGUL, ANDAL DAN TAQWA (KUAT)		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	point	74,62-75,46		73,11-73,96		NA		NA		
	2	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan serta derajat kesehatan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	10,94		9,39		NA		NA		
			Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	18		16		NA		NA		
			Umur Harapan Hidup (UHH)	tahun	73,01-73,32		72,35-72,68		NA		NA		
			Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KH	257-189		257-189		NA		NA		
			Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1000 KH	24.64-16.85		24.64-16.85		NA		NA		
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Kunjungan Pasien	Persen	100	91.052.661.079	100	74.465.009.156	1	-	-	-	RS Umum Provinsi
			Persentase SPM yang mencapai target	Persen	81	20.675.000.000	79	37.105.000.000	747	1.734.782.135	42	39	RS Jiwa Mutiara Sukma
			Persentase cakupan layanan kesehatan masyarakat	Persen	90	125.027.000.000	90	48.259.000.000	#####	542.046.944	1,57	1,57	RS Mandalika
			Persentase SPM mencapai target	Persen	85	151.224.581.000	82	125.409.172.000		67.437.669	-	13,49	RS Manambai
			Persentase RS yang memenuhisarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	Persen	100	4.000.000.000	100	4.000.000.000					RS Mata

No	Tujuan/Sasaran/Program		Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPD pada tahun 2026		Target RKPD/Renja 2024		REALISASI		% Tingkat Capaian		Perangkat Daerah
					Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	
			Persentase Kabupaten/ Kota dengan penurunan kasus kematian ibu 10%	Persen	100	162.802.000.913	100	128.529.344.985	29.746		6,900		Dinas Kesehatan
			Persentase Kabupaten/ Kota dengan penurunan kasus kematian anak 5% per tahun	Persen	100		100		66.855		15,490		Dinas Kesehatan
			Persentase kabupaten/ kota yang telah melaksanakan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer	Persen	100		100						Dinas Kesehatan
			Persentase Puskesmas yang melaksanakan pemantauan wilayah kerja	Persen	100		100						Dinas Kesehatan
			Persentase Puskesmas dengan tata kelola kesehatan masyarakat yang baik	Persen	90		70						Dinas Kesehatan
			Persentase Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) yang dilakukan di daerah terpencil dan sangat terpencil sesuai standar	Persen	100		100						Dinas Kesehatan
			Persentase Puskesmas yang menerapkan BLUD	Persen	100		90						Dinas Kesehatan
			Persentase Balita Wasting	Persen	6		7		0				Dinas Kesehatan

No	Tujuan/Sasaran/Program		Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPD pada tahun 2026		Target RKPD/Renja 2024		REALISASI		% Tingkat Capaian		Perangkat Daerah
					Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	
			Persentase kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (SDG's)	Persen	3,5		3,5		0				Dinas Kesehatan
			Proporsi KK dengan akses sanitasi layak	Persen	91		88,54						Dinas Kesehatan
			Persentase kabupaten/ kota yang mencapai target imunisasi rutin	Persen	95		95						Dinas Kesehatan
			Persentase kabupaten/ kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.(SDG's)	Persen	100		100						Dinas Kesehatan
			Persentase cakupan penemuan dan pengobatan kasus HIV (ODHA on ART)	Persen	90		60		228 kasus		5,18		Dinas Kesehatan
			Persentase cakupan penemuan & pengobatan kasus TBC	Persen	90		90		#####		23,60		Dinas Kesehatan
			Persentase kabupaten/ kota yang mencapai API < 1/1000	Persen	100		100		10 kab		100,00		Dinas Kesehatan
			Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat	Persen	90		90		58 kasus		94,00		Dinas Kesehatan
			Persentase pengobatan penyakit menular pada balita	Persen	90		90						Dinas Kesehatan
			Persentase skrining penyakit menular pada kelompok berisiko	Persen	100		100						Dinas Kesehatan

No	Tujuan/Sasaran/Program		Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPD pada tahun 2026		Target RKPD/Renja 2024		REALISASI		% Tingkat Capaian		Perangkat Daerah
					Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	
			Persentase Kabupaten/ Kota yang mencapai eliminasi penyakit tropis terabaikan	Persen	90		61						Dinas Kesehatan
			Persentase kabupaten/ kota yang melakukan deteksi dini faktor risiko PTM	Persen	100		100						Dinas Kesehatan
			Persentase kabupaten/kota yang melakukan pengendalian faktor risiko PTM	Persen	100		100						Dinas Kesehatan
			Persentase kabupaten/ kota yang melakukan deteksi dan respon potensi KLB/ wabah serta pengendalian faktor risiko kesehatan yang berpotensi KLB/ wabah	Persen	100		100						Dinas Kesehatan
			Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi	Persen	100		100						Dinas Kesehatan
			persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB provinsi	Persen	100		100						Dinas Kesehatan

No	Tujuan/Sasaran/Program		Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPD pada tahun 2026		Target RKPD/Renja 2024		REALISASI		% Tingkat Capaian		Perangkat Daerah
					Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	
			Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Masyarakat Miskin melalui PPI-JK oleh Pemerintah	Persen	100		100						Dinas Kesehatan
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan terakreditasi	Persen	60,1		54						Dinas Kesehatan
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah dengan capaian penilaian Indikator Nasional Mutu > 81	Persen	90		80						Dinas Kesehatan
			Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persen	97		97						Dinas Kesehatan
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase Fasilitas kesehatan yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	Persen	100	1.338.840.800	80	1.106.480.000		-		-	Dinas Kesehatan
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Syarat	Persen	97	158.753.073	90	131.200.887		-		-	Dinas Kesehatan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Aktif	Persen	95	1.343.100.000	80	1.110.000.000		98.702.290		17,11	Dinas Kesehatan
3	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Nusa		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	point	70-75		68,5		NA		NA		

No	Tujuan/Sasaran/Program		Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPD pada tahun 2026		Target RKPD/Renja 2024		REALISASI		% Tingkat Capaian		Perangkat Daerah
					Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	
	Tenggara Barat yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT)	Persentase kota kreatif	%	30			30		NA		NA		
		Indeks Pembangunan Kebudayaan	point	>60			54-60		NA		NA		
		Persentase penanganan konflik SARA	%	100			100		NA		NA		
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi	Persen	25	1.882.500.000		20	1.343.000.000	11	29.310.300	57,00	3,24	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan.	Persen	55,67	1.545.750.000		43,3	1.425.000.000	32,89	17.706.800	57,22	2,68	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase jumlah pemuda berprestasi yang mengikuti kegiatan kepemudaan	Persen	4	3.675.000.000		4	2.200.000.000	2,85	52.352.180	71,14	2,85	Dinas Pemuda dan Olahraga
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Meningkatnya prestasi atlet ditingkat regional, nasional dan internasional	Persen	5	14.766.245.181		5	46.500.000.000	30,02	9.069.592.340		30,02	Dinas Pemuda dan Olahraga
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persen	100	4.496.125.000		100	6.950.000.000	30,00	200.000.000	30,00	19,23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Pelestarian KCKR dan Naskah Kuno Milik Daerah	Persen	100	197.000.000		100	197.000.000	13,00	-	13,00	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis dan Arsip Statis	Persen	100	2.024.985.600		100	2.024.985.600	30	-	30	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Tujuan/Sasaran/Program		Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPD pada tahun 2026		Target RKPD/Renja 2024		REALISASI		% Tingkat Capaian		Perangkat Daerah
					Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Arsip yang Terselamatkan	Persen	100	50.000.000	100	50.000.000					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Berkompeten	Orang	200	2.147.750.000	200	1.775.000.000					Dinas Pariwisata
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase penguatan terhadap Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa pada daerah rawan konflik	Persen	10	562.456.541	10	457.500.000	2	125.312.460	1.670,15	16,70	Bakesbangpoldagri
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase parpol yang melakukan kaderisasi kepengurusan partai politik	Persen	100	33.671.239.086	80	4.653.634.000	-	146.322.861	-	0,09	Bakesbangpoldagri
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang aktif	Persen	70	1.600.137.061	60	488.819.000	0	47.217.480	15,56	6,46	Bakesbangpoldagri
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN	Persentase Desa Bersinar (Bersih Narkoba)	Persen	77,5	848.629.511	75	730.272.000	2	14.020.000	46,53	1,99	Bakesbangpoldagri

No	Tujuan/Sasaran/Program		Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPD pada tahun 2026		Target RKPD/Renja 2024		REALISASI		% Tingkat Capaian		Perangkat Daerah
					Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	
		EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA											
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Cakupan mediasi potensi konflik sosial	Persen	11,43	3.191.596.561	10	3.328.089.000	15	860.763.500	515,38	26,21	Bakesbangpoldagri
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Kualifikasi Layanan Perangkat Daerah	Level	Optimalisasi	681.153.001	Kolaborasi	1.044.768.209		17.297.616		4,893	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
III	TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN YANG LESTARI DAN ASRI		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	point	79,65		75,34		NA		NA		
	4	Meningkatnya ketahanan iklim dan ketangguhan menghadapi resiko bencana	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	19,82		19,7		NA		NA		
			Indeks Risiko Bencana (IRB)	point	106,83		113,08		NA		NA		
			Bauran energi baru terbarukan	%	25		20,99		NA		NA		
		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik	Persen	35,69	2.561.000.000	32,83	2.290.000.000		2.780.000,00	36,21	36,21	Dinas ESDM
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	Persen	100	14.362.680.480	100	12.260.479.736	-	42.337.924	-	3,67	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Tujuan/Sasaran/Program		Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPD pada tahun 2026		Target RKPD/Renja 2024		REALISASI		% Tingkat Capaian		Perangkat Daerah
					Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase kawasan hutan yang dikelola	Persen	100	92.088.114.454	100	79.839.403.170	21,58	205.282.751	21,58	21,58	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan	Usaha/ Kegiatan	30	1.426.536.475	30	1.178.947.500	9	5.490.000	30,00	14,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Pengaduan	20	99.824.867	20	82.499.890	4	4.640.000	20,00	12,28	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5	Meningkatnya kualitas ekosistem darat, laut dan udara	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	point	65,51			65,56		NA		NA		
		Indeks Kualitas Air	point	47,9			45,71		NA		NA		
		Indeks Kualitas Udara	point	<50			75-89		NA		NA		
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				198.003.892.715		205.267.611.500		379.998.000	21,77	22,77	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				26.981.207.000		13.690.000.000		99.850.000	0,42	0,42	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				7.350.000.000		11.405.000.000					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN				2.025.837.000		2.000.000.000					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPD pada tahun 2026		Target RKPD/Renja 2024		REALISASI		% Tingkat Capaian		Perangkat Daerah
				Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	
IV	PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH											
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				22.875.000.000		21.225.000.000		4.949.585.000		36,08	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi	Persen	100	1.116.820.778	100	1.027.124.610					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah unit usaha yang dikendalikan pengelolaan B3 dan limbah B3 nya	Unit Usaha	210	110.984.000	210	100.400.000					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	Persen	100	717.933.653	100	593.126.160	45,83	38.237.787,00	45,83	18,74	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan kapasitas sekolah peduli lingkungan	Persen	40	299.549.643	20	264.917.060	15,15	2.878.000	15,15	15,15	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan lokasi yang dikendalikan pencemaran dan kerusakannya	Lokasi	10	1.543.862.687	10	1.275.919.575	10	22.223.245	-	44,45	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
IV	TERWUJUDNYA KUALITAS KESEJAHTERAAN	Angka kemiskinan	%	<9		<10		NA		NA		

No	Tujuan/Sasaran/Program		Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPD pada tahun 2026		Target RKPD/Renja 2024		REALISASI		% Tingkat Capaian		Perangkat Daerah
					Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	
	MASYARAKAT YANG MANDIRI		Prevalensi Stunting	%	<10		14		NA		NA		
			Gini rasio	angka	0,358		0,366		NA		NA		
	6	Meningkatnya pemerataan pendapatan serta kesejahteraan lahiriah (fisik) dan rohaniah (non fisik)	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	point	73,65		68,73		NA		NA		
			Indeks Ketahanan Pangan	point	79,67		77,67		NA		NA		
			Indeks Kesejahteraan Sosial	kategori	Baik		Baik		NA		NA		
			Indeks Demokrasi	point	78,75		77,47		NA		NA		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial	Persen	100	13.146.768.824	100	12.504.327.000	20,87	4.033.936.250	0,00	20,87	Dinas Sosial
		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase PMB (pekerja migran bermasalah) dan KPO (Korban Perdagangan Orang) dan KTK (Korban Tindak Kekerasan) tertangani	Persen	100	803.377.045	100	764.118.500	25,18	107.030.632,00	25,18	25,18	Dinas Sosial
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani	Persen	4,5	22.970.105.069	2,5	19.510.289.310					Dinas Sosial
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Persen	100	12.712.702.446	100	12.091.472.100	11,43	1.638.200.900	11,43	11,43	Dinas Sosial

No	Tujuan/Sasaran/Program		Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPD pada tahun 2026		Target RKPD/Renja 2024		REALISASI		% Tingkat Capaian		Perangkat Daerah
					Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan Penanganan Bencana Daerah Provinsi	Persen	100	2.572.056.526	100	2.446.368.100	34,45	383.061.500	34,45	34,45	Dinas Sosial
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN)/Makam Pahlawan Nasional (MPN)	Persen	100	895.583.495	100	703.559.700	12,43	20.980.000	12,43	12,43	Dinas Sosial
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kab/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	Persen	100	284.350.000	100	235.000.000	-	23.357.370	-	20,33	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang memiliki perangkat hubungan industrial	Persen	23	2.718.350.000	21	2.390.000.000	12,43	172.125.750,00	59,19	21,79	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yg menerapkan Norma Ketenagakerjaan & K3	Persen	23	1.461.580.228	21	1.345.365.000	16,59	157.454.800,00	72,13	24,92	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persen	9	510.000.000	5	410.000.000	-	13.280.000	-	1,75	DP3AP2KB
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perlindungan terhadap perempuan	Persen	165	370.000.000	125	352.000.000	-	14.789.800	-	2,28	DP3AP2KB
			Cakupan perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	100		100						DP3AP2KB

No	Tujuan/Sasaran/Program		Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPD pada tahun 2026		Target RKPD/Renja 2024		REALISASI		% Tingkat Capaian		Perangkat Daerah
					Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Perempuan Rentan yang Bekerja	Persen	100	151.000.000	85	145.000.000	-	26.015.000	-	5,20	DP3AP2KB
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan Data Gender dan Anak yang Mendukung Indikator Kinerja	Persen	97	30.015.696	95	28.850.150				-	DP3AP2KB
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan / pembinaan KLA	Kab/Kota	10	540.000.000	10	500.000.000	-	86.265.400		17,25	DP3AP2KB
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan anak yang aktif	Persen	100	1.100.000.000	50	980.000.000	-	28.488.300	-	4,19	DP3AP2KB
			Cakupan anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	100		100						DP3AP2KB
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase perangkat daerah/ Badan /Lembaga dalam pemanfaatan GDPK	Persen	100	215.086.456	100	206.734.388	-	1.500.000	100	0,68	DP3AP2KB
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Peningkatan Peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesetaraan ber-KB	Persen	100	150.000.000	100	150.000.000	100	22.619.016	100	7,54	DP3AP2KB

No	Tujuan/Sasaran/Program		Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPD pada tahun 2026		Target RKPD/Renja 2024		REALISASI		% Tingkat Capaian		Perangkat Daerah
					Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase satuan pendidikan formal yang melaksanakan PIK-R (Pusat Informasi Koseling Remaja).	Persen	100	250.000.000	100	150.000.000		-		-	DP3AP2KB
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Stok Cadangan Pangan Masyarakat	Persen	86,62	1.046.000.000	71,97452229	846.000.000					Dinas Ketahanan Pangan
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Informasi Harga dan Pasokan Pangan Pokok Strategis	Persen	100	2.215.000.000	100	1.010.000.000	100,00	27.758.560,00	100,00	7,54	Dinas Ketahanan Pangan
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Prevalensi of Undernourishment	Persen	3	1.100.000.000	2,24	600.000.000	-	30.990.000,00	-	2,75	Dinas Ketahanan Pangan
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Komoditi Pangan Segar yang diawasi	Persen	100	670.000.000	100	365.000.000	-	10.840.000	-	9,94	Dinas Ketahanan Pangan
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Peningkatan Volume Usaha Simpan Pinjam	Persen	2	1.270.500.000	2	1.050.000.000					Dinas Koperasi dan UKM
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang dinyatakan Sehat dan Cukup Sehat	Unit Usaha	103	1.512.500.000	100	1.250.000.000					Dinas Koperasi dan UKM
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang Ditingkatkan Volume Usahanya	Unit Usaha	14	4.840.000.000	10	4.000.000.000					Dinas Koperasi dan UKM

No	Tujuan/Sasaran/Program		Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPD pada tahun 2026		Target RKPD/Renja 2024		REALISASI		% Tingkat Capaian		Perangkat Daerah
					Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	
			Jumlah Koperasi yang diukur tingkat kesehatannya	Unit Usaha	0		0						Dinas Koperasi dan UKM
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM yang ditingkatkan pengetahuan perkoperasian dan Pengetahuan UKM	Persen	80	6.050.000.000		80	5.000.000.000		392.970.500,00		23,32	Dinas Koperasi dan UKM
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang ditingkatkan Volume Usahnya	Unit Usaha	45	3.267.000.000		45	2.700.000.000		407.100.000		21,18	Dinas Koperasi dan UKM
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Unggul	Usaha	50	3.963.306.600		50	3.275.460.000					Dinas Pariwisata
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Persen	100	2.262.743.384		100	1.965.490.400		-	-	-	Dinas Perumahan dan Permukiman
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase sarana dan infrastruktur yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana alam	Persen		14.642.100.000			12.090.100.000	-	2.420.000	-	0,15	Dinas Perumahan dan Permukiman
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Luas Prasarana dalam kondisi baik	ha	85	300.733.205.000		85	228.007.996.000		34.760.000	-	0,01	Dinas Perumahan dan Permukiman
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI,	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi	Laporan	100	1.210.000.000		100	1.000.000.000			-	-	Dinas Perumahan dan Permukiman

No	Tujuan/Sasaran/Program		Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPD pada tahun 2026		Target RKPD/Renja 2024		REALISASI		% Tingkat Capaian		Perangkat Daerah
					Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	
		KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah										
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase Kelompok Tani Hutan yang meningkat kelasnya	Persen	40	299.549.643	20	264.917.060	15,15	2.878.000,00	15,15	15,15	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
7	Meningkatnya perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial dan inklusi keuangan	Tingkat inflasi	%	2-4			2-4		3,63		100		
		Persentase kepesertaan jaminan sosial kesehatan/ Universal Health Coverage (UHC)	%	100			95		NA		NA		
		Persentase kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	65			43		NA		NA		
		Peningkatan Pendapatan per kapita	%	>10			8		NA		NA		
		Tingkat Literasi Keuangan	%	>67			65-67		NA		NA		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah UKM yang menjalin Kemitraan dan Export	Unit Usaha	2	7.018.000.000	2	5.800.000.000		147.147.250		4,73	Dinas Koperasi dan UKM
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM yang Berwirausaha dan terfasilitasi NIB	Unit Usaha	20	2.178.000.000	20	2.250.000.000		392.970.500		23,32	Dinas Koperasi dan UKM

No	Tujuan/Sasaran/Program		Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPD pada tahun 2026		Target RKPD/Renja 2024		REALISASI		% Tingkat Capaian		Perangkat Daerah
					Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	
		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan listrik (Rumah Tangga)	RT	1000	2.246.750.000	1000	1.865.000.000		2.830.000,00	37,15	37,15	Dinas ESDM
			Jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan listrik sesuai standar keselamatan ketenagalistrikan (Jiwa)	Jiwa	4		4						Dinas ESDM
		PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase izin usaha pertambangan yang dikendalikan	Persen	11,17	719.500.000	9,5	532.500.000		2.810.000,00	28,10	28,10	Dinas ESDM
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	Persen	2-4%	1.123.000.000	2-4%	900.000.000	2,000	22.460.000,000	50,0	9,240	Dinas Perdagangan
V	TERWUJUDNYA PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH		Indeks Reformasi Birokrasi	point	A		BB		NA		NA		
	8	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pola pikir, kelembagaan, regulasi dan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik	Nilai SAKIP	kategori	A		A		NA		NA		

No	Tujuan/Sasaran/Program		Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPD pada tahun 2026		Target RKPD/Renja 2024		REALISASI		% Tingkat Capaian		Perangkat Daerah
					Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	
		PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.) Jumlah Dok Perencanaan Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi	Dokumen	2	5.505.651.526	3	3.194.482.520	-	333.382.796	10	21	Bappeda
			2.) Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan indikator makro dan kabupaten-kota yang ditindaklanjuti	%	85		75		-				Bappeda
			3) Persentase target tahunan indikator kinerja tematik bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang tercapai	%	100		100		-				
			4) Jumlah penambahan mitra pembangunan baru yang teregistrasi	unit	10		10		-				
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.) Persentase Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang selaras	%	100	13.291.439.546	100	7.778.790.380	-	1.158.010.502	15	18	Bappeda
			2.) Persentase rekomendasi kebijakan perangkat daerah yang ditindaklanjuti	%	85		75		-				Bappeda

No	Tujuan/Sasaran/Program		Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPD pada tahun 2026		Target RKPD/Renja 2024		REALISASI		% Tingkat Capaian		Perangkat Daerah
					Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	
			3.) Persentase target tahunan indikator kinerja tematik bidang teknis yang tercapai	%	100		100		-				
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang memiliki KTP -El per-satuan penduduk	Persen	96,4	694.282.840	96,2	573.026.000	99,29	4.857.000,00	103,21	10,55		DPMDESDUKCAPIL
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan Di Bidang Catatan Sipil	Persen	100	417.955.220	100	344.656.000	97,52	-	97,52	-		DPMDESDUKCAPIL
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Tingkat Kabupaten/Kota	Persen	100	1.644.507.702	100	1.347.896.910		-	-	-		DPMDESDUKCAPIL
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase jenis data yang tersaji	Persen	100	133.100.000	100	110.000.000		-	-	-		DPMDESDUKCAPIL
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Pimpinan dan Layanan Umum	Persen	100	132.210.733.215	100	134.210.733.215	26,2	27.259.317.991,0	32,7	29,4		Biro Umum
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Pimpinan dan Layanan Umum	Persen	100	9.014.800.235	100	7.834.712.050	1,0	1.575.690.232,0	20,9	20,9		Biro Administrasi Pimpinan
	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Cakupan pelaksanaan program penataan organisasi	Persen	100	841.507.316	100	754.623.796						Biro Organisasi

No	Tujuan/Sasaran/Program		Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPD pada tahun 2026		Target RKPD/Renja 2024		REALISASI		% Tingkat Capaian		Perangkat Daerah
					Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	
		PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Persen	100	1.086.629.423	100	1.070.374.140					Biro Hukum
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase penyelesaian kebijakan administrasi pemerintahan umum dan pengembangan otonomi daerah	Persen	100	740.673.970	100	652.211.846					Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kesejahteraan Rakyat Dari Segi Mental Spiritual, Kebutuhan Dasar dan Non Kebutuhan Dasar	Persen	100	57.176.696.303	100	44.808.181.644					Biro Kesejahteraan Rakyat
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase bahan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan	Persen	100	3.894.903.000	100	2.641.346.000	100	98.050.900	100	3,04	Biro Perekonomian
		PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		Persen		484.000.000		400.000.000					Biro Administrasi Pembangunan
		PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	Persen	80	6.322.968.000	75	5.208.676.000	82	130.600.000	110	5,32	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persen	100	43.390.706.827	100	49.120.214.981	100,00	#####	100,00	40,66	Sekretariat DPRD
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Ketepatan waktu Penetapan	Persen	100	1.501.830.316.707	100	1.314.001.729.449		352.312.443.691		29,65	BPKAD

No	Tujuan/Sasaran/Program		Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPD pada tahun 2026		Target RKPD/Renja 2024		REALISASI		% Tingkat Capaian		Perangkat Daerah
					Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	
			APBD/APBDP dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi										
			Meningkatnya Ketepatan Waktu Evaluasi Rancangan APBD/APBDP dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD/APBDP Kab/Kota	Persen	100		100						BPKAD
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Persentase Pengelolaan BMD pada PD yang Akurat dan Akuntabel	Persen	79	4.236.341.947	75	3.674.744.220		417.406.925		15,72	BPKAD
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Nilai Penerapan Merit Sistem	Nilai	369,5	3.260.950.000	301,5	2.695.000.000	-	307.484.000	-	32,44	Badan Kepegawaian Daerah
			Persentase Dimensi Kualifikasi Pendidikan ASN sesuai dengan Jenjang Pendidikan	Persen	13,8		13,4						Badan Kepegawaian Daerah
			Persentase Dimensi Kinerja ASN yang Bernilai Baik	Persen	25,2		23,6						Badan Kepegawaian Daerah
			Persentase Aspek Disiplin ASN	Persen	4,99		4,98						Badan Kepegawaian Daerah
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Persentasi ASN bersertifikat Kompetensi Manajerial	Poin	0,32	3.286.464.591	0,29	4.682.473.127	11	444.561.180	110,00	23,77	BPSDM
			Persentase ASN bersertifikat	Poin	0,32		0,29		6		300,00		BPSDM

No	Tujuan/Sasaran/Program		Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPD pada tahun 2026		Target RKPD/Renja 2024		REALISASI		% Tingkat Capaian		Perangkat Daerah
					Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	
			Kompetensi Fungsional										
			Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Tekhnis	Poin	0,32		0,29		5		29,41		BPSDM
			Persentase Pejabat Fungsional yang tersertifikasi	Persen	0,32		0,29		-		-		BPSDM
	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG		Angka kunjungan wisatawan pada Anjungan NTB TMII	Orang	44000	2.595.530.030	43000	2.592.190.030	17.102	369.480.000	39,77	34,83	Badan Penghubung
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Persentase Penurunan Nilai Kerugian Negara/ Daerah pada Perangkat Daerah per Wilayah Binaan Inspektorat Pembantu	Persen	6	14.643.741.738	4	12.102.265.899		44.640.000	-	74	Inspektorat
			Persentase Permintaan ADTT oleh APH yang Ditindaklanjuti	Pengaduan	90		80				-		Inspektorat
			Persentase Nilai MCP di Atas Rata - Rata Nasional	Persen	86		82				-		Inspektorat
			Persentase Rekomendasi yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu (60 hari)	Persen	60		60			104.765.000	-	10	Inspektorat
			Persentase PD yang Menyelesaikan Tindaklanjutan Rekomendasi >50%	Persen	90,5		89				-		Inspektorat
			Persentase Rata-Rata Penyelesaian Tindaklanjutan Temuan BPK Diatas Rata-Rata Nasional	Persen	82		80				-		Inspektorat

No	Tujuan/Sasaran/Program		Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPD pada tahun 2026		Target RKPD/Renja 2024		REALISASI		% Tingkat Capaian		Perangkat Daerah
					Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	
			Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP Terintegrasi	Persen	90		70			-	-	-	Inspektorat
			Persentase Perangkat Daerah yang Memperoleh Nilai Implementasi SAKIP Predikat A - AA.	Persen	55,55		44,44			37.485.000,00	-	23,36	Inspektorat
			Persentase Kehandalan Capaian IKK Perangkat Dalam LPPD	Persen	100		100			19.980.000	-	100	Inspektorat
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Persentase Badan Publik yang Informatif	Persen	50.37	6.615.452.050	42.96	6.752.481.299		708.884.459		12,31	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
			Persentase Layanan yang Terintegrasi	Persen	12.03	231.796.290	8.22	222.795.357					Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Cakupan Data Statistik Sektoral yang Tervalidasi	Persen	90	231.796.290	70	222.795.357		44.050.100		29,37	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Indeks Keamanan Informasi	Persen	455	198.161.718	286	190.466.857		27.464.500		18,31	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
9	Meningkatnya kemandirian fiskal daerah		Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	point	Tinggi		Sedang		NA		NA		
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				90	4.749.035.920	70	3.756.506.700					Dinas Perindustrian

No	Tujuan/Sasaran/Program		Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPD pada tahun 2026		Target RKPD/Renja 2024		REALISASI		% Tingkat Capaian		Perangkat Daerah
					Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			1,1	1.543.049.375	1,02	1.099.750.000		-			Dinas Perindustrian
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Proporsi Dana Transfer Terhadap Pendapatan Daerah	Persen	54,66	212.390.000	52,82	204.150.000					Bappenda
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah diluar DAK	Persen	48,5	6.821.900.000	50,34	6.805.340.000					Bappenda
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Penurunan Nilai Kerugian Negara/ Daerah pada Perangkat Daerah per Wilayah Binaan Inspektorat Pembantu	Persen	6	10.911.441.200	4	9.017.720.000		120.713.000	85	418.000.000	90
			Persentase Nilai MCP di Atas Rata - Rata Nasional	Persen	86		82			51.926.000	84	275.000.000	86
			Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP Terintegrasi	Persen	90		70			35.970.000,0	-	29,6	
			Persentase Pengaduan Masyarakat Tepat Waktu	Persen	85		75			89.348.749,0	-	4,9	
			Persentase Peningkatan Level Masing - Masing Elemen Kapabilitas APIP	Persen	0,05		0,01			56.785.900,0	-	30,1	

No	Tujuan/Sasaran/Program		Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPD pada tahun 2026		Target RKPD/Renja 2024		REALISASI		% Tingkat Capaian		Perangkat Daerah
					Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	
			Persentase Perangkat Daerah yang Memperoleh Nilai Implementasi SAKIP Predikat A - AA.	Persen	55,55		44,44			19.845.000,00	-	49,61	
			Persentase PD yang Menerepkan ZI Menuju WBK/ WBBBM	Persen	62,5		62,5			12.600.000,00	-	15,35	
			Persentase Perangkat Daerah yang Meningkatkan Nilai PMPRB	Persen	55		55			26.940.000,00	-	26,96	
VI	TERWUJUDNYA PENINGKATAN CAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGs)		Persentase Capaian Indikator SDGs	%	76		63		NA		NA		
	10	Meningkatnya integrasi program pembangunan daerah dan peran pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)	Persentase capaian Pilar Pembangunan Sosial	%	80		65		NA		NA		
			Persentase capaian Pilar Pembangunan Ekonomi	%	75		60		NA		NA		
			Persentase capaian Pilar Pembangunan Lingkungan	%	72		67		NA		NA		
			Persentase capaian Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola	%	75		60		NA		NA		
		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase izin pemanfaatan air tanah yang dikendalikan	Persen	10,04	4.155.000.000	7,88	3.955.000.000		720.000,00	9,38	9,38	Dinas ESDM
			Persentase kab/kota yang melaksanakan pengelolaan air	Persen	100		100			27413450,00	31,20	31,20	Dinas ESDM

No	Tujuan/Sasaran/Program		Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPD pada tahun 2026		Target RKPD/Renja 2024		REALISASI		% Tingkat Capaian		Perangkat Daerah
					Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	
			tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku										
VII	TERWUJUDNYA Peningkatan Daya Saing Daerah		Indeks Daya Saing Daerah	point	3,51		3,35		NA		NA		
11	Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan strategis, kawasan transmigrasi dan perdesaan, mendorong investasi dan percepatan industrialisasi		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	point	85		77		NA		NA		
	PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI		persentase Kawasan Baru Transmigrasi	Persen	100	160.000.000	100	160.000.000	-	-			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Persentase kawasan transmigrasi yang dibangun	Persen	100	397.500.000	100	357.500.000	-	2.771.250	100	1,58	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Cakupan kawasan transmigrasi yang dikembangkan	Persen	100	725.000.000	100	725.000.000	-	-			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		Persentase sarana dan infrastruktur yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana alam			30.115.000.000		30.115.000.000	-	2.420.000,00	-	0,15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					54.915.000.000		54.915.000.000		557.742.600,00	0,74	0,74	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	PROGRAM PENATAAN					3.800.000.000		4.700.000.000		480.000,00	0,02	0,02	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Tujuan/Sasaran/Program		Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPD pada tahun 2026		Target RKPD/Renja 2024		REALISASI		% Tingkat Capaian		Perangkat Daerah
					Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	
		BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA											
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				462.584.626.000		478.625.167.290		5.553.193.698,00	11,88	11,88	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rasio Peningkatan Iklim Investasi	Persen	10	964.261.558	10	796.910.378		19.920.000		8,14	DPMPTSP
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Cakupan Promosi Penanaman Modal	Persen	90	1.397.585.681	80	1.155.029.489		20.266.890		13,51	DPMPTSP
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase capaian layanan perizinan dan non perizinan	Persen	93	1.038.573.759	93	858.325.420		5.826.200		29,52	DPMPTSP
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase perusahaan yang taat LKPM	Persen	60	1.436.964.887	60	1.187.574.287		61.205.000		8,17	DPMPTSP
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Cakupan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi	Persen	100	227.637.328	100	188.130.023					DPMPTSP
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Daya Tarik Pariwisata Daerah Yang Berkembang	Lokasi	2	5.026.256.477	2	4.153.930.973					Dinas Pariwisata
12	Meningkatnya konektivitas yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan regional	Rasio konektivitas	%	96			94		NA		NA		

No	Tujuan/Sasaran/Program		Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPD pada tahun 2026		Target RKPD/Renja 2024		REALISASI		% Tingkat Capaian		Perangkat Daerah
					Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Persen	100	9.097.731.552	100	6.879.192.100	100	398.799.280	40,52	14,92	Satuan Polisi Pamong Praja
			Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	Persen	100		100		100		100		Satuan Polisi Pamong Praja
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Indeks Keselamatan Transportasi	Indeks	361,99	89.135.335.833	356,35	21.988.453.500				-	Dinas Perhubungan
			Tingkat Pengembangan Infrastruktur Terminal	Persen	25		25						Dinas Perhubungan
			Kualitas Layanan Angkutan Umum	Persen	100		90,91						Dinas Perhubungan
			Kepatuhan Legalitas Operasional Angkutan	Persen	44,31		40,39						Dinas Perhubungan
13		Meningkatnya kapabilitas inovasi mendukung peningkatan kinerja industri dan pengembangan ekspor	Indeks Inovasi Daerah	point	80		78		NA		NA		
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Peningkatan Kapasitas Daerah	Persen	100	4.494.943.331	100	4.094.275.300	6,85	115.585.065,00	6,85	5,58	BPBD

No	Tujuan/Sasaran/Program		Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPD pada tahun 2026		Target RKPD/Renja 2024		REALISASI		% Tingkat Capaian		Perangkat Daerah
					Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Peningkatan Nilai SPM	Persen	100	1.665.878.750	100	1.491.500.000	100,00	73.636.728,00	100,00	73,64	BPBD
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Cakupan Fasilitas Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persen	100	2.268.750.000	100	1.875.000.000	-		-	-	Dinas Perdagangan
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Tambang	Persen	9	3.100.000.000	5	2.500.000.000	-		-	-	Dinas Perdagangan
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Fasilitas Peningkatan Kapasitas Pemasaran Kelompok UKM	Persen	100	3.823.600.000	100	3.160.000.000	30,00	23.234.943,00	30,00	6,64	Dinas Perdagangan
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen		69.254.273.036		47.188.134.400					BRIDA

BAB IV : PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil rekapitulasi yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Laporan evaluasi RKPD Triwulan I merupakan Laporan evaluasi pelaksanaan program prioritas berdasarkan sasaran pembangunan sampai Triwulan I Tahun 2024. Evaluasi ini mengacu pada RKPD Tahun 2024 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 48 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024. Dalam RKPD Provinsi NTB Tahun 2023, terdapat 13 sasaran pembangunan daerah dengan 35 Indikator Kinerja. Dari sasaran tersebut, kemudian dijabarkan kedalam 148 program prioritas pembangunan daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.739.587.403.552,00, sedangkan alokasi dalam APBD Tahun 2024 menjadi Rp. 6.205.414.024.675 atau ada peningkatan sebesar Rp. 465.830.873.247 dengan realisasi mencapai sebesar Rp1.367.697.226.758,57 atau sebesar 22,04% dengan realisasi program masih nihil karena belum dapat diukur capaian outcomenya sedangkan realisasi kegiatan sudah mencapai 22,89%.
2. Rendahnya capaian kinerja disebabkan karena pekerjaan pada Triwulan I masih terfokus pada program kegiatan yang bersifat administratif, dan pembayaran hutang pada Tahun Anggaran 2023 serta adanya perubahan penjabaran APBD Tahun 2024. Selain itu, rendahnya realisasi fisik dan serapan anggaran pada triwulan I ini, disebabkan karena adanya keterlambatan ditetapkannya perpres tentang juknis DAK 2024 serta sebagian besar kegiatan yang bersifat fisik masih dalam tahap persiapan dan proses kontraktual serta terdapat beberapa kegiatan dengan anggaran cukup besar terjadwal dalam anggaran kas Triwulan III – IV tahun anggaran 2024
3. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah. Sebagaimana yang telah ditetapkan RPD Provinsi NTB tahun 2024-2026, terdapat 10 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah. terdapat 2 indikator yang sudah dapat diukur tetapi capaiannya belum memenuhi target. Adapun indikator yang sudah dapat diukur yaitu Kontribusi sektor gabungan lapangan usaha ekonomi yang berbasis pada sektor pertanian terhadap PDRB, dan Persentase peningkatan pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB.

4.2 Rekomendasi

Rekomendasi umum yang diberikan terhadap hasil evaluasi RKPD adalah:

1. Perlu menjaga konsistensi antara target dan alokasi belanja sebagaimana telah ditetapkan dalam RKPD dengan APBD;
2. Perlu melakukan analisis yang komprehensif terhadap sumber-sumber pendapatan daerah sebagai dasar dalam menyusun kerangka ekonomi dalam RKPD supaya tidak terlalu jauh gap antara sumber pendapatan yang ditetapkan dalam RKPD dengan yang tertuang dalam APBD
3. Perlu dilakukan penyesuaian target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada perubahan RKPD Tahun 2024 sesuai dengan adanya perubahan yang terjadi dalam APBD tahun 2024;
4. Perlu peningkatan Konsolidasi internal dan koordinasi antar stakeholders agar capaian kinerja dapat terus ditingkatkan, karena beberapa indikator tidak hanya dapat dicapai dengan dukungan APBD Provinsi;
5. Terhadap target-target yang belum tercapai agar dilakukan pengawalan dan memfokuskan penganggaran sehingga pencapaian target kinerja di tahun depan dapat diakselerasi;
6. Perlu mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kegiatan secara lebih intensif dan berkala sehingga dapat mengefektifkan pencapaian kinerja sesuai dengan yang ditargetkan.